



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



Laporan Tahunan **2023**

*"Pengawasan kuat dan
tegas untuk **ekonomi biru**"*

Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Assalamuallaikum wrwb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Segala puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan Tahunan Ditjen PSDKP tahun 2023, dengan tema **“Pengawasan Kuat dan Tegas untuk Ekonomi Biru”** dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab sekaligus memberikan gambaran kegiatan terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu unit kerja di KKP, Ditjen PSDKP berkomitmen untuk mendukung dan mengawal kebijakan Ekonomi Biru melalui berbagai kegiatan dan kebijakan. Pelaksanaan pengawasan SDKP tidak lepas dari permasalahan, kendala, dan hambatan. Namun demikian, dengan upaya penanganan dan langkah-langkah strategis, permasalahan tersebut dapat diminimalisir dan kegiatan pengawasan SDKP dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa segala capaian yang telah diraih oleh Ditjen PSDKP pada tahun 2023 merupakan hasil usaha seluruh pegawai Ditjen PSDKP serta kolaborasi dan kerja sama dengan para mitra dan pemangku kepentingan. Kami berharap agar semangat usaha dan kolaborasi ini dapat terus dilanjutkan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, serta kami terbuka dengan saran dan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Salam #Nusantara Lestari Jaya

Adin Nurawaluddin

Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Capaian Penting 2023



2 unit

Pembangunan
Kapal Pengawas



4 unit

Pembangunan
Prasarana
Pengawasan



2 unit

Pembangunan
Speed Boat
Pengawas



**1.110
kelompok**

Pokmaswas yang
Dibina



93 hari

Operasi Kapal
Pengawas



**493 pelaku
usaha**

Yang Dilakukan
Pengawasan
Destructive Fishing



30 hari

Operasi Speedboat
Pengawas



**537 pelaku
usaha**

Yang Dilakukan
Pengawasan
Kepatuhan Usaha
Sektor Kelautan



150 hari

Operasi Airborne
Surveillance



**2.522 pelaku
usaha**

Yang Dilakukan
Pengawasan
Kepatuhan Usaha
Sektor Perikanan



1 sistem

Operasional
Pemantauan SDKP
(Pusdal)

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Kuat & Tegas untuk **Ekonomi Biru**



Daftar Isi

1	Portofolio Organisasi
5	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan & Perikanan
21	Pemantauan & Operasi Armada
43	Penanganan Pelanggaran
65	Hukum & Kerja Sama
76	Manajemen Transformasi & Reformasi Birokrasi

Portofolio Organisasi



0121 5759 107/108
130-JUL 17 2021

0121 5759 107/108
130-JUL 17 2021

Direktorat Jenderal PSDKP

Direktorat Jenderal PSDKP terdiri dari 5 Unit Kerja Pusat dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan jumlah PNS sebanyak 1.331 orang termasuk Penyidik PNS, Polsus PW3K (pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) serta Awak Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan. Struktur organisasi Ditjen PSDKP pada gambar berikut.



1331 Orang
Pegawai ASN Ditjen PSDKP



1 Orang
Eselon I



6 Orang
Eselon III



8 Orang
Eselon V



423 Orang
Fungsional Tertentu



5 Orang
Eselon II

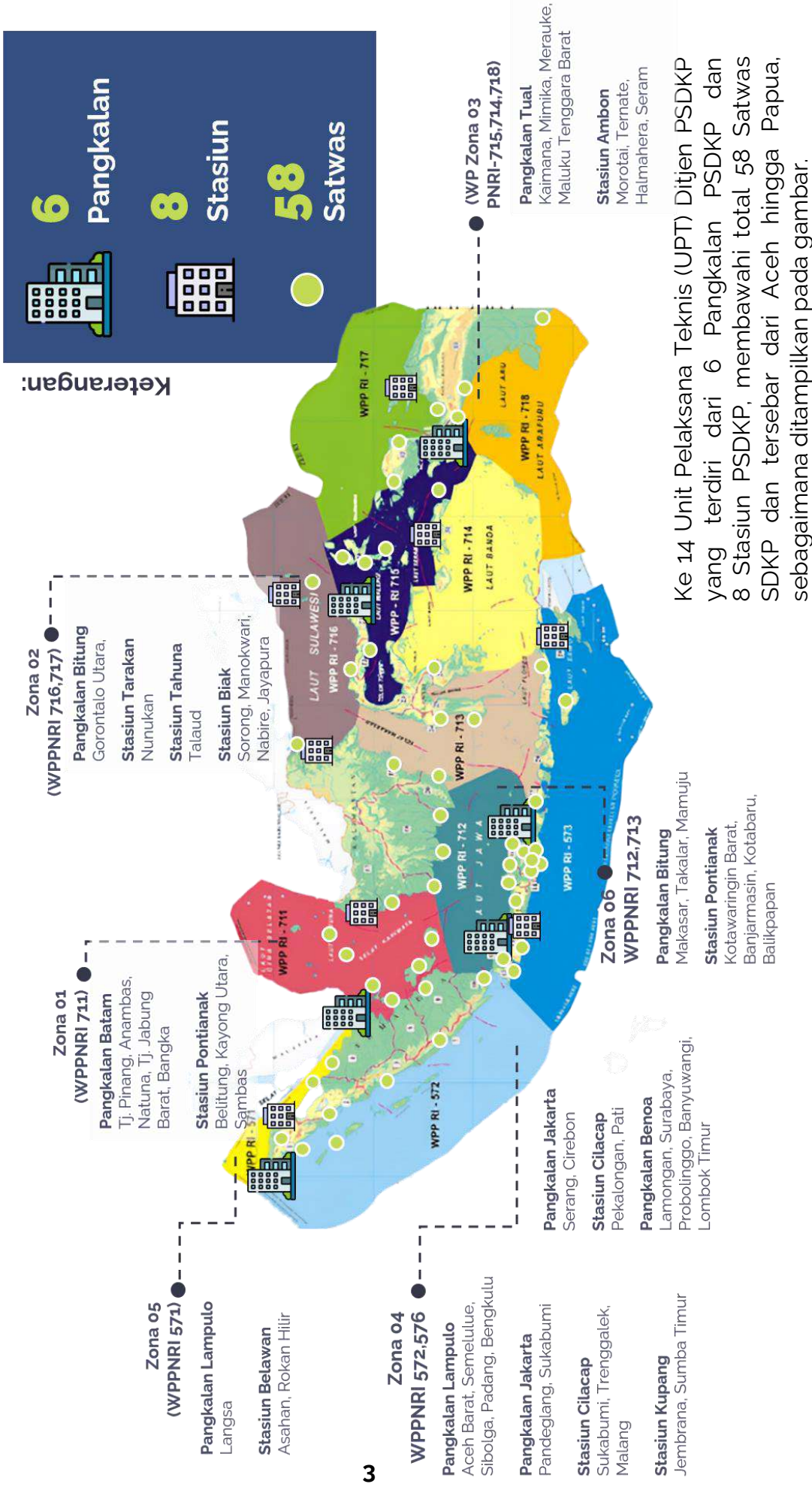


14 Orang
Eselon IV



874 Orang
Fungsional Umum

UPT Ditjen PSDKP



Ke 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PSDKP yang terdiri dari 6 Pangkalan PSDKP dan 8 Stasiun PSDKP, membawahi total 58 Satwas SDKP dan tersebar dari Aceh hingga Papua, sebagaimana ditampilkan pada gambar

Prasarana Pengawasan

Prasarana Pengawasan untuk mendukung operasional pengawasan SDKP merujuk pada Peraturan Dirjen PSDKP nomor 10/PER-DJPSDKP/2020 tentang Penyiapan Prasarana PSDKP.

Prasarana Ditjen PSDKP tersebar di 14 UPT Ditjen PSDKP dengan sebaran Kapal Pengawas di 6 zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan 11 WPP NRI.

34 Unit Kapal Pengawas

	Kelas I	KP Orca 01 KP Orca 02 KP Orca 03	KP Orca 04 KP Orca 05 KP Orca 06	6
	Kelas II	KP Hiu Macan Tutul 01 KP Hiu Macan Tutul 02 KP Paus 001 KP Barakuda 01 KP Barakuda 02		5
	Kelas III	KP Hiu Macan 001 KP Hiu Macan 003 KP Hiu Macan 004 KP Hiu Macan 005 KP Hiu Macan 006 KP Hiu 11	KP Hiu 12 KP Hiu 13 KP Hiu 14 KP Hiu 15 KP Hiu 16 KP Hiu 17	12
	Kelas IV	KP Hiu 001 KP Hiu 002 KP Hiu 003 KP Hiu 004 KP Hiu 005	KP Hiu 006 KP Hiu 007 KP Hiu 008 KP Hiu 009 KP Hiu 010	10
	Kelas V	KP Akar Bahar 001		1

91

Unit Speedboat dan URC



Pusdal PSDKP



2

Unit Pesawat Patroli

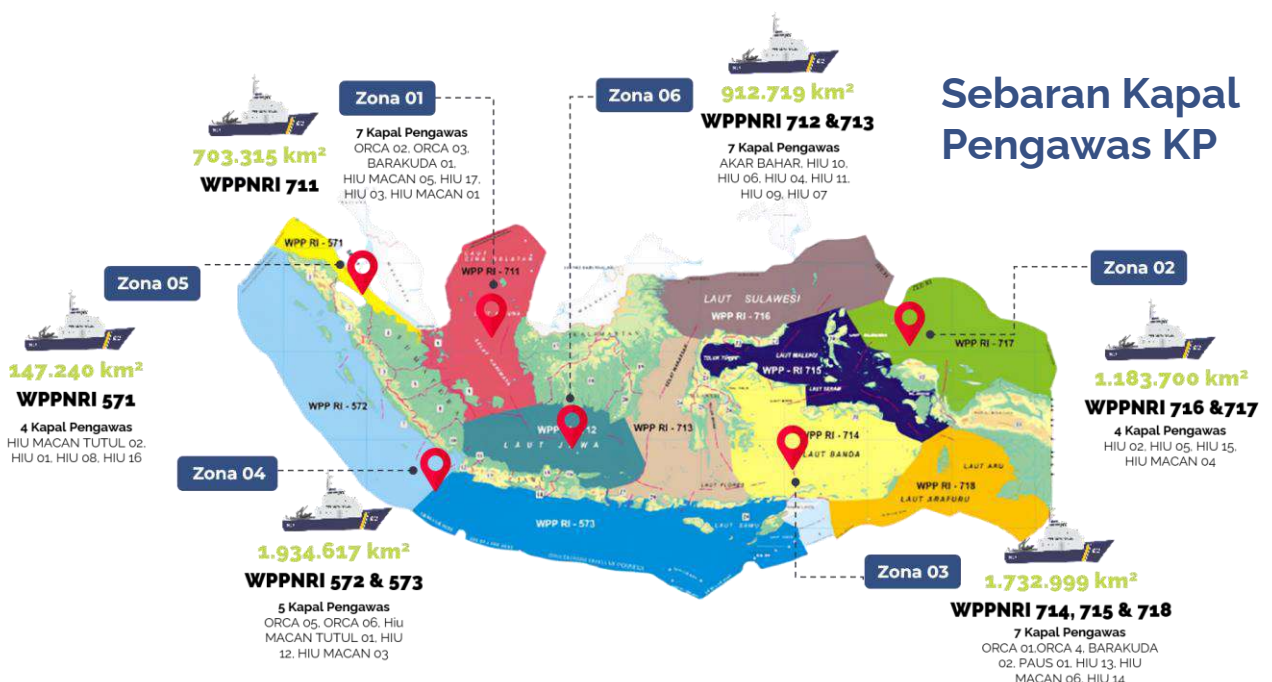
Belum sepenuhnya Pangkalan PSDKP memiliki dermaga kapal pengawas



KP. ORCA 05



KP. ORCA 06



Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan & Perikanan



Tindak Tegas Pelanggaran Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)

Kegiatan pemanfaatan ruang laut di Indonesia yang dilakukan secara menetap lebih dari 30 hari wajib memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Pemanfaat ruang laut, selanjutnya juga wajib memiliki perizinan berusaha subsektor pengelolaan ruang laut yang penerbitan izinnya telah terintegrasi melalui *One Single Submission* (OSS).

Pada tahun 2023, Dirjen PSDKP selaku pemegang kewenangan dalam pengawasan dan penegakkan hukum di KKP telah melakukan penegakkan hukum terhadap 42 pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan ruang laut dan kegiatan berusaha pada sub sektor pengelolaan ruang laut. Penegakkan hukum dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan (penyegekan) maupun pengenaan denda administratif.

Pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Polisi Khusus PWP3K (pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) tersebut didominasi oleh kegiatan reklamasi yang tidak memiliki KKPRL dan izin reklamasi. Kegiatan reklamasi yang marak dilakukan oleh para pelaku usaha di pesisir Indonesia di antaranya untuk perluasan lahan, pembangunan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).



Penyelesaian Sengketa PWP3K



Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal PSDKP menangani sebanyak 4 kejadian yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan ditindaklanjuti melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebanyak 3 (tiga) sengketa telah dilakukan penetapan besaran ganti kerugian kerusakan lingkungan dan telah lunas dibayarkan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp 3.581.799.102,52. Sedangkan 1 (satu) sengketa yang merupakan kejadian kebocoran kapal dengan muatan aspal di Nias, Sumatera Utara, telah dilimpahkan kepada Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenkomarves). Pelimpahan sengketa ini dilakukan karena ingin mendalami terlebih dahulu instansi mana yang nantinya akan ditunjuk sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa ini, mengingat bahwa selain KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Gerakan Nasional Mendukung Bulan Cinta Laut



Menteri Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan 5 program prioritas nasional dimana salah satunya adalah Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal PSDKP melakukan patroli pengawasan sampah plastik di laut dan pembersihan serta pengumpulan sampah plastik di laut yang diselenggarakan di 14 titik lokasi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PSDKP. Sebanyak 6,5 ton sampah telah dikumpulkan yang selanjutnya diserahkan kepada unit pengelola sampah di masing-masing lokasi.



Direktorat Jenderal PSDKP juga melakukan upaya pencegahan berupa pemasangan stiker larangan pembuangan sampah di laut pada 847 kapal perikanan yang tersebar di Indonesia. Selain itu, dilakukan juga pemasangan papan larangan membuang sampah di laut di 44 titik lokasi. Pemasangan stiker dan papan larangan dilakukan sebagai upaya preventif untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah plastik di laut yang bisa menyebabkan pencemaran dan merusak ekosistem laut.

Penyelundupan BBL? Ditjen PSDKP Gelar Operasi Bersama

Dalam rangka pencegahan penyelundupan komoditas Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri, Ditjen PSDKP menginisiasi Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan BBL di beberapa lokasi di tanah air. Operasi pengawasan ini menggandeng Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan (Bea Cukai), Otoritas Bandara, Kepolisian Republik Indonesia, TNI-AL, Badan Karantina Indonesia, PT. Angkasa Pura I, PT. Angkasa Pusa II, PT ASDP Indonesia Ferry, serta stakeholder lainnya yang berperan di bandar udara dan pelabuhan.

Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan BBL Tahun 2023 dilaksanakan pada 1-31 Desember 2023. Kegiatan ini diawali dengan Upacara Bersama di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, pada hari Jumat 1 Desember 2023.

Kolaborasi dan semangat sinergitas antar K/L terlihat pada kegiatan ini dengan terlibatnya setiap perwakilan pada Apel Kesiapan dan juga pengawasan rutin yang dilaksanakan sepanjang bulan Desember.

Seluruh instansi yang terlibat menyadari bahwa untuk mengatasi penyelundupan BBL, diperlukan strategi pengawasan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku usaha pemanfaat BBL baik pelaku usaha penangkapan, pendistribusian dan pembudidayaan BBL yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengawasan Pemanfaatan BBL juga dilakukan di lokasi penangkapan dan budidaya BBL. Target lokasi operasi pengawasan penangkapan dan budidaya BBL di Tahun 2023 meliputi:

1. Provinsi Banten (Lebak, Sukabumi, Garut)
2. Provinsi Jawa Barat (Tasikmalaya, Cianjur, Pangandaran)
3. Provinsi Jawa Timur (Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Jember)
4. Provinsi Jawa Tengah dan DIY (Gunung Kidul, Kebumen, Cilacap)
5. Provinsi Palembang (Palembang)
6. Provinsi Lampung (Pesisir Barat Lampung)
7. Provinsi Bengkulu (Kota Bengkulu, Kab. Seluma)
8. Provinsi Bali (Bali, Jembrana, pengambangan)
9. Provinsi NTB (Labangka), dan
10. Provinsi Sulawesi Tenggara (Teluk Moramo - Konawe Selatan)



Selanjutnya, tindak lanjut yang dilakukan Pengawas Perikanan saat ditemukan pelanggaran di lokasi penangkapan BBL, yaitu menyerahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk diberikan pembinaan dan sanksi administrasi, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang tergabung dalam operasi.

Penyadartahuan Masyarakat

Direktorat Jenderal PSDKP tidak hanya melakukan penegakkan hukum dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran, namun juga melakukan upaya preventif melalui kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Sebanyak 900 orang telah menerima penyadartahuan pada tahun 2023 di 5 lokasi. Kelima lokasi adalah lokasi yang rawan terjadi pelanggaran.

Sosialisasi Pengawasan & Pengendalian Pencemaran (Tegal, Jawa Tengah)



- Penyampaian materi oleh perwakilan dari Ditjen PRL, Ditjen PSDKP, LANAL Tegal, DKP Jawa Tengah dan DLH Kota Tegal
- Diskusi interaktif
- Deklarasi **Stop Mencemari Laut**
- Penempelan stiker **Stop Cemari laut** pada kapal perikanan yang bersandar di Pelabuhan Tegalsari

Kampanye dan Deklasrasi Stop Pemanfaatan Penyu (Morowali, Sulawesi Tengah)



- Penyampaian materi oleh MUI, Dinas Kesehatan, DKP Sulteng, POLRI, dan TNI AL
- Penyerahan sukarela 4 buah gelang penyu dari peserta edukasi
- Diskusi interaktif dengan siswa sekolah dasar
- Deklarasi **Stop Pemanfaatan Penyu**
- Penghargaan kepada para pihak yang berpartisipasi dalam pengawasan penyu

Kampanye dan Deklasrasi Stop Destructive Fishing (Bima, NTB)



- Penyampaian materi dampak *destructive fishing* dan sanksi bagi pelaku
- Penandatanganan **Komitmen Bersama Masyarakat Anti Penangkapan Ikan dengan Bom & Racun Ikan**
- Diskusi interaktif

Sosialisasi Pengawasan Jasa Kelautan (Morowali, Sulawesi Tengah)



- Penyampaian materi oleh perwakilan dari Ditjen PRL, Ditjen PSDKP,
- Diskusi interaktif

Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (Bali)



- Penyampaian materi oleh perwakilan dari Ditjen PRL, Ditjen PSDKP,
- Diskusi interaktif

Berpihak Kepada Nelayan Lokal, Ditjen PSDKP Segel Ikan Impor yang Tidak Sesuai Peruntukan

Sebanyak 9 (sembilan) perusahaan telah disegel di beberapa lokasi di tanah air sepanjang tahun 2023. Pasalnya, mereka ditemukan memasarkan ikan hasil importasi ke pasar-pasar tradisional. Hal ini bermula dari adanya pengaduan masyarakat yang melaporkan masuknya ikan-ikan impor sehingga mengganggu harga ikan nelayan lokal di pasar. Ikan impor jenis *Pacific Mackerel* - yang dikenal dengan nama lokal Ikan Salem-tersebut pada dasarnya diperuntukkan sebagai bahan baku pemindangan. Nyatanya beberapa perusahaan yang terlibat dengan kegiatan importasi tersebut terbukti melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur peruntukan komoditas importasi hasil perikanan dengan menjual langsung ke pasar tradisional.

Pada awal bulan Maret 2023, Tim dari Ditjen PSDKP menindaklanjuti laporan dari Masyarakat terkait adanya ikan impor yang beredar di Pasar Porda Juwana - Pati, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan di lokasi, Pengawas Perikanan menemukan barang bukti berupa kardus berisi ikan impor yang masih tersegel rapi. Penyelidikan terus dilakukan hingga didapatkan informasi terkait pelaku usaha (importir) yang mengirim atau menjual ikan tersebut ke distributor lokal.





Kejadian serupa ternyata juga ditemukan di pasar-pasar tradisional di provinsi lainnya, yaitu Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Penindakan terus dilakukan hingga Menteri Kelautan dan Perikanan ikut serta menyaksikan penyegelan salah satu Perusahaan.

Sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 Pasal 294, beberapa pelaku usaha impor yang mengirim atau menjual ikan impor tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan terkait kegiatan importasi dengan mengimpor komoditas perikanan namun tidak sesuai dengan peruntukan. Dengan pelanggaran tersebut, pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 277 ayat (3) dan Pasal 286 ayat (3). Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 320 ayat 3 huruf o, pelanggaran terhadap kegiatan importasi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan dikenakan denda administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dikali harga dasar komoditas ikan yang diimpor dikali jumlah komoditas yang diimpor

Dari penindakan-penindakan tersebut, terdapat 10 pelaku usaha impor yang dikenakan denda administrasi dan 9 perusahaan yang disegel sepanjang tahun 2023. Total ikan impor yang dikenai denda yaitu 411.365 Kg dengan jumlah denda yang terkumpul sebanyak Rp. 1.569.760.500,-



Kawal PNBP Pasca Produksi, e-SLO Nonstop 24 Jam

Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Salah satu kegiatan pengawasan perikanan adalah pengawasan usaha penangkapan ikan termasuk di dalamnya pengawasan kapal perikanan.

Dalam melakukan pengawasan kedatangan kapal perikanan, Pengawas Perikanan memeriksa kedatangan kapal yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kedatangan kapal perikanan (HPK Kedatangan) yang dilakukan secara online melalui aplikasi e-SLO berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi (SLO) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan mengatur bahwa nilai produksi ikan pada saat didaratkan digunakan sebagai dasar penentuan besaran tarif PNBP pungutan hasil perikanan pascaproduksi. Dengan diberlakukannya penerapan PNBP pasca produksi, diperlukan dukungan pengawasan kapal perikanan yang komprehensif untuk membantu memastikan penerimaan negara dari hasil tangkapan kapal perikanan

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, dijelaskan bahwa untuk pelaku usaha dengan perizinan pascaproduksi besaran Pungutan Hasil Perikanan dihitung secara mandiri (*self assessment*) oleh Pelaku Usaha yang dilaporkan melalui aplikasi e-PIT.

Data pelaporan mandiri yang dilaporkan melalui aplikasi e-PIT akan langsung terkoneksi dengan aplikasi e-SLO dan secara otomatis dimunculkan dalam HPK Kedatangan. Ketentuan pelaporan mandiri oleh pelaku usaha inilah yang wajib dicermati oleh Pengawas Perikanan, mengingat terdapat potensi pelaku usaha tidak melaporkan dengan benar ikan hasil tangkapan untuk menghindari pembayaran PNBP yang sebenarnya.

Mitigasi Pelanggaran PIT, Pengawas Perikanan Ditingkatkan Kompetensinya



Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota merupakan salah satu Program Prioritas Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru Periode 2021-2024. Sebagai upaya untuk mendukung PIT agar berjalan dengan baik, diperlukan peningkatan kompetensi bagi Pengawas Perikanan berupa *upgrade* pengetahuan dan informasi baik secara khusus maupun umum melalui bimbingan teknis (Bimtek).

Upaya pengawasan di era penerapan UUCK ditekankan dalam upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan standar pelaksanaan melalui pendekatan berbasis risiko dan menciptakan kepatuhan pelaku usaha.

Bimtek Simulasi Pengawasan PIT yang dilaksanakan pada tanggal 6-10 November 2023 di Bitung, Sulawesi Utara bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan menyamakan persepsi pengawasan PIT kepada 30 orang peserta yang merupakan perwakilan dari UPT Ditjen PSDKP dan DKP Provinsi melalui praktik lapangan, pembagian tugas kelompok, dan diskusi dengan narasumber, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi yang terkait dengan implementasi PIT.

Nilai kemampuan peserta Bimtek mengalami kenaikan sebanyak 22% dari nilai rata-rata 66 sebelum tes menjadi rata-rata 88 setelah tes.



Pelaku Usaha Patuh, Perikanan Maju

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dan memajukan perikanan Indonesia secara umum, Ditjen PSDKP melalui Direktorat PPSDP telah mengadakan Sosialisasi dan Diseminasi Regulasi Bidang Perikanan pada tahun 2023:

- Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) yang dilarang Permen KP No. 18 Tahun 2021 di Cirebon yang dihadiri 200 Peserta
- Sosialisasi Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko di PPP Tegalsari di TEGAL yang dihadiri 200 peserta
- Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Produk Hasil Perikanan (Lobster, Kepiting dan Rajungan) di TRENGGALEK yang dihadiri 200 peserta
- Sosialisasi Larangan Pembudidayaan Ikan yang Membahayakan dan Merugikan di MAGELANG yang dihadiri 200 peserta
- Sosialisasi Kebijakan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan Hasil Perikanan di PALEMBANG yang dihadiri 200 peserta
- Sosialisasi Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lobster di PELABUHANRATU yang dihadiri 200 peserta
- Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan di LAMPUNG yang dihadiri 300 peserta

Dengan adanya sosialisasi dan diseminasi regulasi yang dilakukan oleh Direktorat PPSDP selama tahun 2023, telah diketahui pemahaman pelaku usaha bidang perikanan senilai 88,53 yang meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 86,16



Mendukung Program Prioritas, Pengawas Perikanan Pastikan Pembudidaya Miliki Izin Usaha

Pengawasan kampung perikanan budidaya merupakan salah satu Upaya Ditjen PSDKP untuk mendukung program prioritas Menteri kelautan dan perikanan dalam pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya telah ditetapkan di 210 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas Perikanan dengan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Pemerintah Daerah setempat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pembudidaya ikan memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan terkait perizinan berusaha dan standar usaha pembudidayaan ikan.

Pada tahun 2023 pengawasan telah dilakukan terhadap 144 pembudidaya ikan di 36 lokasi kampung perikanan budidaya dengan hasil 61 pembudidaya ikan memenuhi persyaratan, 40 pembudidaya ikan belum memiliki NIB dan Sertifikat Standar, 43 pembudidaya belum memenuhi prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) / Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).



Pembudiaya ikan yang belum memiliki perizinan berusaha terdapat di lokasi:

1. KPB Nila – Temanggung
2. KPB Rumput Laut – Buleleng
3. KPB Lele – Bantul
4. KPB Windu – Bulungan
5. KPB Arwana – Kapuas Hulu
6. KPB Kepiting Tarakan
7. KPB Nila – Malinau
8. KPB Windu – Tarakan
9. KPB Bandeng – Sambas
10. KPB Gabus – Kotawaringin Barat

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Direktorat Jenderal PSDKP merekomendasikan beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan antara lain:

- a. Pendampingan, sosialisasi dan gerai Perizinan di lokasi kampung perikanan budidaya
- b. Perizinan berusaha menjadi persyaratan dalam penetapan kampung perikanan budidaya
- c. Mendorong pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemeriksaan perizinan berusaha berbasis risiko di kampung perikanan budidaya



Kehadiran Pengawas Perikanan Mampu Mengubah UPI Tidak Patuh Menjadi Patuh

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan selama tahun 2023 yaitu melakukan pengawasan Unit Pengolah Ikan (UPI) yang ada di seluruh Indonesia. Selama tahun 2023 Pengawas Perikanan telah memberikan Surat Peringatan Teguran Tertulis I kepada 6 (enam) pelaku usaha dan juga Paksaan Pemerintah (Penghentian Sementara Kegiatan) kepada 2 (dua) pelaku usaha. Pelanggaran yang diberikan karena pelaku usaha tidak memenuhi kelengkapan dokumen Persetujuan Lingkungan, KBLI tidak sesuai dan tidak memiliki SKP. Rincian data pelaku usaha yang diberikan sanksi administratif pada tahun 2023, yaitu:

- 1 (satu) UPI di Pangkalan PSDKP Benoa
- 1 (satu) UPI di Pangkalan PSDKP Tual
- 3 (tiga) UPI di Stasiun PSDKP Ambon
- 1 (satu) UPI di Stasiun PSDKP Pontianak
- 2 (dua) UPI di Stasiun PSDKP Tarakan

Semua pelaku usaha yang diberikan sanksi administratif berupa Surat Peringatan Teguran Tertulis I dan Paksaan Pemerintah diketahui telah memenuhi kewajiban dan pada akhirnya dinyatakan telah patuh/ tertib atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak lepas dari peran serta Pengawas Perikanan dalam mendampingi pelaku usaha untuk dapat melengkapi semua ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan.



Sinergi Pengawasan Bersama Mengawal Perikanan Indonesia

Ditjen PSDKP pada tahun 2023 telah berhasil melakukan kegiatan pengawasan bersama dengan Kementerian/Lembaga lain dalam rangka mewujudkan perikanan Indonesia yang taat akan peraturan perundang-undangan. Sinergi pengawasan bersama dilakukan pada Selasa, 28 Februari 2023 di salah satu Unit Pengolah Ikan (UPI) wilayah UPT Pangkalan PSDKP Benoa yaitu PT. Bali Mina Utama

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan melibatkan Kementerian Investasi/BKPM, KKP, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan DPMPTSP Provinsi Bali. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan dengan mekanisme wawancara, pengecekan dokumen, peninjauan langsung di lokasi kegiatan usaha dan pengambilan foto/dokumentasi untuk melihat pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kepemilikan perizinan berusaha;
- b. Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- c. Pelaksanaan kegiatan usaha: persyaratan kelayakan pengolahan, rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala (LKU/LKPM), penyerapan tenaga kerja Indonesia dan/atau investasi besar, kemitraan dengan UMKM, kepatuhan terhadap fasilitas, insentif dan kemudahan dalam rangka penanaman modal.

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa hasil penilaian kepatuhan teknis PT. Bali Mina Utama sebesar 97,5% dan dinyatakan **“Telah Memenuhi Persyaratan”**.



Pemantauan & Operasi Armada



Kiprah Kapal Pengawas



Kapal pengawas kelautan dan perikanan berfungsi melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan di laut. Mekanisme pengawasan di laut menerapkan pengawasan terintegrasi (integrated surveillance system/ISS) melalui mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dari pusat pengendalian (command center), data radar satellite,

Automatic Identification System (AIS) dan data intelijen. Kinerja operasi kapal pengawas pada tahun 2023 berhasil melakukan pemeriksaan kepatuhan (compliance) kapal perikanan sebanyak 6.525 kapal yang terdiri dari 6.492 kapal berbendera Indonesia dan 33 kapal ikan berbendera asing serta menangkap sebanyak 269 kapal. Capaian tersebut tidak terlepas dari penyediaan logistik kapal pengawas sepanjang tahun 2023 seperti Bahan Bakar Minyak (BBM)



Total **2.977** Hari Operasi
Rata-rata **93,03** Hari Operasi

Total **6.525** Kapal Diperiksa
6.492 KII dan **33** KIA

Total **269** Kapal Ditangkap
252 KII dan **17** KIA,
52 Rumpon diangkat/diamankan

Indeks kinerja operasi kapal
pengawas
Target : **87,60**
Realisasi: **97.74**

Rincian Tangkapan Kapal Pengawas

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap, terdapat **269 (dua ratus enam puluh sembilan)** kapal perikanan yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Rekapitulasi kapal perikanan pelaku illegal fishing yang berhasil ditangkap atau dilakukan sita dokumen oleh kapal pengawas adalah sebagai berikut:

Kapal Ditangkap Berdasarkan WPPNRI		
No.	WPP NRI	Jumlah
1	WPP-571	64
2	WPP-572	3
3	WPP-573	9
4	WPP-711	34
5	WPP-712	25
6	WPP-713	44
7	WPP-714	32
8	WPP-715	15
9	WPP-716	13
10	WPP-717	6
11	WPP-718	24
JUMLAH		269

Daftar Tangkapan Berdasarkan Negara

269 Kapal Perikanan

 Indonesia (252)

 Malaysia (8)

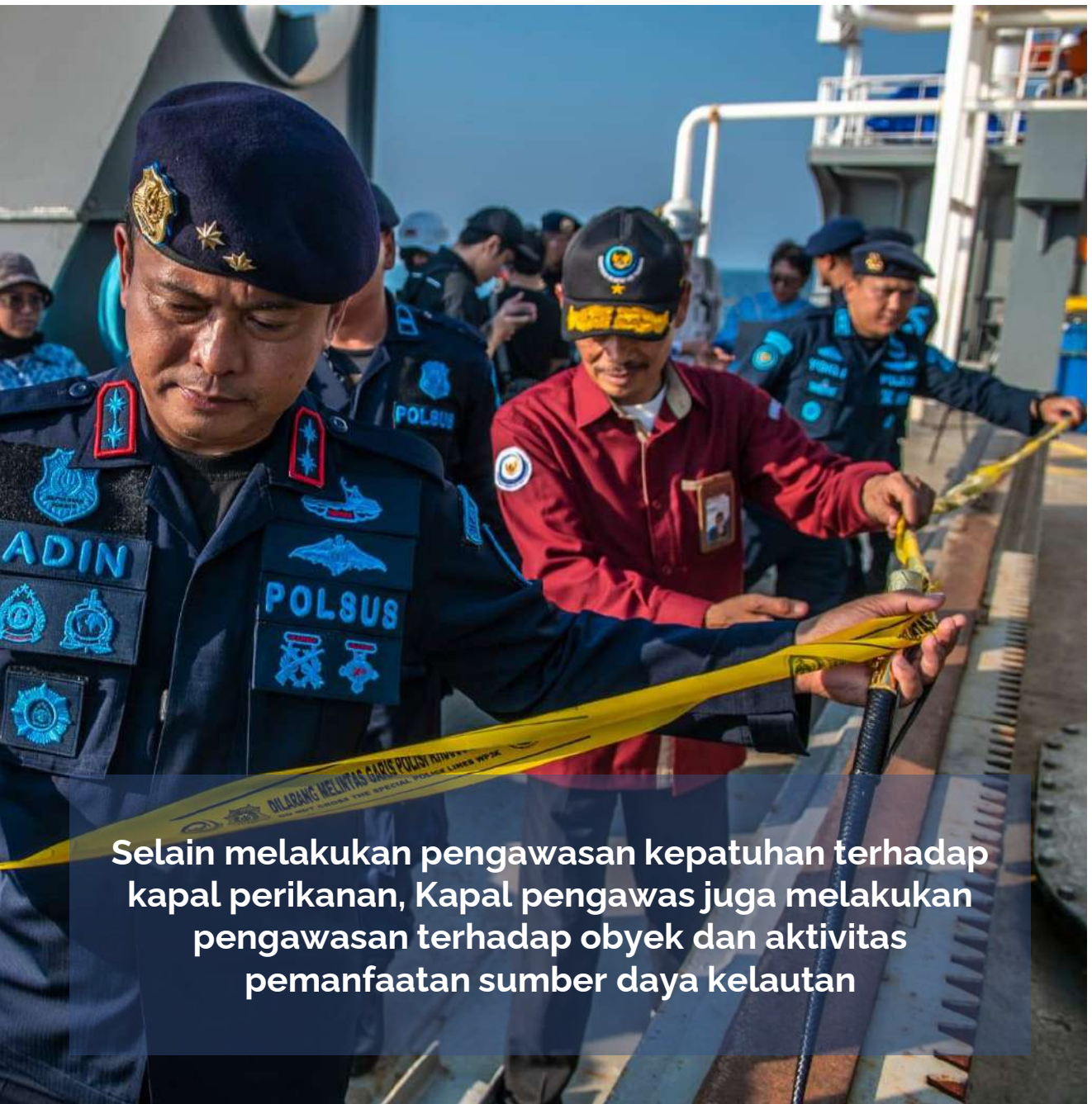
 Vietnam (1)

 Filipina (7)

 Netherland (1)



Kinerja Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan



Selain melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kapal perikanan, Kapal pengawas juga melakukan pengawasan terhadap obyek dan aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan



Pengawasan Terhadap Obyek dan Aktivitas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan

- Penghentian dan pemeriksaan terhadap MV Vox Maxima, yaitu kapal pengeruk pasir dengan muatan 29.920 GT. Kapal MV. Vox Maxima tersebut dipekerjakan oleh PT. HLS dalam melakukan pengerukan pasir laut untuk keperluan proyek reklamasi di Tanjung Priok Jakarta. Terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. HLS, diantaranya menggunakan kapal isap untuk melakukan eksploitasi hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut tanpa izin, tidak dilengkapi dokumen PKKPRL, dan tidak ada izin pemanfaatan hasil sedimentasi untuk reklamasi.
- Penghentian terhadap 3 kapal, yaitu KM. ARFAN II, KM. PENGISAP PASIR, dan KM. TERUBUK yang melakukan eksploitasi pasir laut di Pulau Rupa yang merupakan salah satu dari Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Kawasan Strategi Nasional Tertentu (KSNT).
- Penghentian KM. CALENGKONG CANTANG (16 GT), KM. RUPAT INDAH (15 GT), dan KM. PANTAI INDAH (6 GT) yang melakukan Pengangkatan BMKT tanpa dilengkapi perizinan yang sah
- Penghentian sementara kegiatan pengerukan muara sungai Tulang Bawang PT. Sienar Tri Tunggal Perkasa (PT STTP) atas kegiatan pengerukan muara sungai Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung Karena belum dilengkapi PKKPRL

Kapal pengawas juga berperan strategis dalam mendukung kebijakan Pasca produksi sebagai implementasi penangkapan ikan terukur yaitu melalui kepatuhan kapal perikanan. Capaian kinerja yaitu melakukan penghentian, pemeriksaan dan penahanan kapal yang diduga melakukan transshipment di laut dengan modus menghindari pembayaran PNPB pasca produksi serta melakukan pemeriksaan kapal untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kapal izin daerah yang menangkap diatas 12 NM dan kapal-kapal tersebut didorong untuk bermigrasi ke izin pusat.



Henrikan Terhadap Kapal yang Diduga Melakukan Transshipment

Kinerja kapal pengawas lainnya yang dicapai adalah melindungi ekologi dan ekosistem perairan Indonesia dengan penertiban rumpon ilegal yang dipasang di Perairan Indonesia, rumpon-rumpon tersebut diduga merupakan rumpon kapal ikan asing dan mayoritas berada di Utara Laut Sulawesi. Sebanyak 52 rumpon ilegal tersebut telah dilakukan pemutusan dan pengangkatan/pengamanan.



Penertiban Rumpon Ilegal

Kerja Sama Operasi

Kerja sama operasi merupakan salah satu bentuk sinergitas antar instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut. Kerja sama operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan dilakukan dengan wadah Kerjasama yaitu 1) patroli bersama, yaitu kerja sama yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, 2) patroli Gempur Narkotika Bersama (Purnama) yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antar K/L dalam memerangi masuknya narkoba melalui laut, 3) patroli bersama pengawasan dan penindakan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) melalui laut, 4) Patroli terkoordinasi yaitu melalui patroli antar negara yaitu Australia-Indonesia (Ausindo) Gannet-7 dan Malaysia-Indonesia (Malindo).

PATROLI AUSTRALIA INDONESIA



- Tindaklanjut Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)
- Nama operasi : Gannet-7
- Pelaksanaan : 17 sd 27 Mei 2023
- Armada terlibat : KP. Orca 01 dan 1 pesawat ATR Air Surveillance
- Hasil : Pemeriksaan 21 KII

OPERASI LAUT INTERDIKSI TERPADU



- Purnama 3 (Gempur Peredaran Narkotika Bersama).
- 25 Mei sd 6 Juni 2023
- Armada terlibat : KP. Hiu 16, KP. Hiu 15, KP. Hiu 06
- Hasil pemeriksaan : 20 kapal

PATROLI TERPADU MALAYSIA INDONESIA



- Patkor Optima Malindo 30 A 2023 tanggal 5-14 Juli 2023
- Armada terlibat : KP. Hiu 16 dan 17
- Hasil pemeriksaan : 15 Kapal

OPERASI BERSAMA



- Tindaklanjut PP 13 Tahun 2022 Tentang Keamanan dan Keselamatan dan penegakan hukum di laut
- 13 Maret sd 21 April 2023
- Armada terlibat : KP. Hiu 17 (Selat Malaka) dan Paus 01 (Laut Arafuru)
- Hasil : kapal diperiksa 157 kapal dan ditangkap 3 kapal (2 KII dan 1 KIA)



OPERASI BERSAMA PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PENYELUNDUPAN BBL

- Upacara Pembukaan Operasi Bersama dilaksanakan di Batam Tanggal 1 Desember 2023
- Armada terlibat : KP. Hiu Biru 01 dan Hiu Biru 02
- Hasil Pemeriksaan : 3 KII



Operasi Pesawat Patroli

Pengawasan di laut (while fishing) berdasarkan konsep Monitoring, Control and Surveillance (MCS) memerlukan instrumen pengawasan udara (airbone surveillance). Pengawasan udara memiliki kelebihan yaitu daya jangkau pengawasan yang luas serta biaya yang murah jika dibandingkan dengan instrument pengawasan lainnya. Ouput dari pengawasan udara tersebut yaitu sebagai input bagi operasi kapal pengawas mengenai obyek, posisi, aktivitas kapal maupun kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak terjangkau instrument pengawasan lainnya. Melalui keberadaan pengawasan udara tersebut maka pengawasan kapal pengawas akan jauh lebih efektif dan efisien. Pengawasan udara pada tahun 2023 adalah sebanyak 150 hari operasi, kemudian data obyek kelautan dan perikanan yang dipantau melalui udara digunakan sebagai tindaklanjut pengawasan oleh kapal pengawas seperti Bahan Bakar Minyak (BBM)



1119 Unit Kapal Perikanan Tervalidasi
995 KII 124 KIA

150 Hari Operasi
(614,96 Jam Terbang)

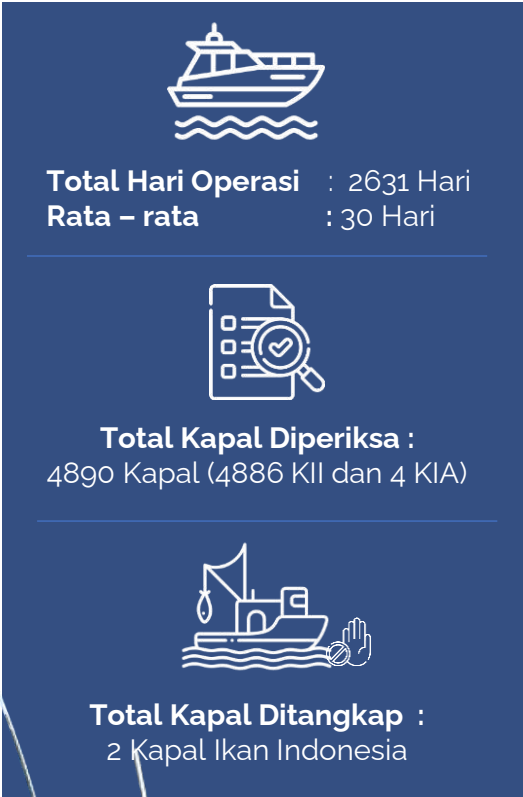
Coverage Area : 1.127.947,2 NM2

85 Unit Rumpon yang tervalidasi

Operasi Speedboat



Target hari operasi rata-rata Speedboat/RIB/RB UPT operasi dengan capaian rata-rata hari operasi mencapai 30 hari operasi dari jumlah PSDKP pada tahun 2023 sebesar 30 (tiga puluh) hari operasi. Pelaporan hasil operasi speedboat dilakukan secara Triwulan. Hingga TW IV, speedboat pengawasan telah melaksanakan speedboat sebanyak 91 unit speedboat. Hingga akhir 2023, terdapat tangkapan yang dilakukan oleh Speedboat pengawasan sebanyak 2 Kapal Perikanan (2 KII). Adapun kapal yang ditangkap adalah KM. WULANDARI 99 dan KM MARWAH dengan pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen lengkap. Berikut ini adalah Hasil Operasi Speedboat Pengawasan s.d. TW IV tahun 2023 :



Pemantauan & Analisis SPKP

Pemantauan Kapal Perikanan adalah aktivitas pemantauan Kapal yang sudah berizin dan memasang Vessel Monitoring System (VMS). Dari **10.843** SIPI yang aktif sebanyak **7.367** kapal telah memiliki SKAT dan terpantau melakukan aktivitas penangkapan ikan di WPPNRI. Hasil pemantauan dilakukan analisis di Pusat Pengendalian didapati **1.683** kapal terindikasi pelanggaran.

Melakukan Pemantauan terhadap Kapal Pengangkut Ikan Hidup sejumlah 39 Kapal dan 18 Kawasan Konservasi. Memberikan data dukung untuk Ops Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli (sumber data : SPKP, AIS, Radar Satelit)

INDIKASI PELANGGARAN

1683
Indikasi



10.843

SIPI Aktif

7.367

Memiliki
VMS

3.476

Proses
Pemasangan
VMS/Migrasi



7.367

Memiliki
SKAT

2.358

Di 11 WPP

2.164

Di Pelabuhan

1.243

Di laut Lepas

1.602

VMS Tidak Aktif

Analisis Indikasi Pelanggaran

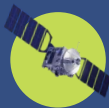
Pusat Pengendalian (Pusdal) PSDKP melakukan pemantauan kepada Kapal Perikanan agar tetap patuh terhadap peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dengan menerbitkan indikasi pelanggaran melalui pemantauan SPKP. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Selama tahun 2023, diterbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 1683 kapal dengan rincian sebagai berikut :



Daerah Penangkapan Ikan
891 Kapal.



Laut Lepas
62 Kapal.



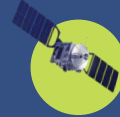
Jalur Penangkapan
668 Kapal.



Poaching
56 Kapal.



Pelabuhan Pangkal/Muat
5 Kapal



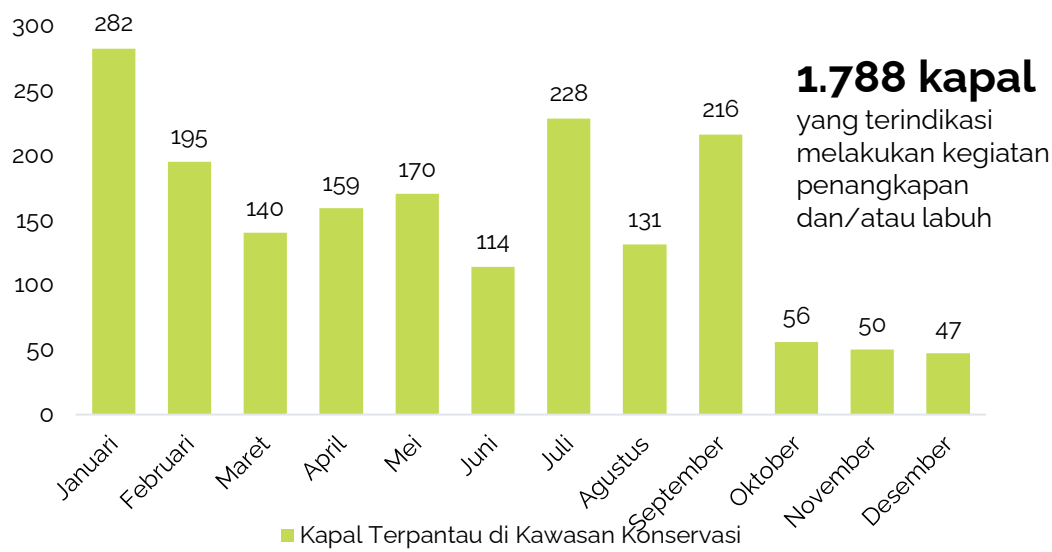
Lainnya
1 Kapal.

Indikasi yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran daerah penangkapan ikan, dimana kapal beroperasi tidak sesuai dengan izin. Mayoritas pelanggaran ditemukan di Laut Jawa (WPP NRI 712), selain itu terdapat pelanggaran di laut lepas Samudera Hindia dan perairan luar negeri. (Papua Nugini dan Timor Leste).

Pemantauan Kawasan Konservasi



Permen KP Nomor 60 tahun 2007 tentang Kawasan konservasi menjelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya ikan. Sesuai dengan Permen KP tersebut, Pusdal PSDKP melakukan pemantauan terhadap Kawasan konservasi di perairan Indonesia yang melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam Kawasan konservasi. Indikasi tersebut disampaikan kepada Direktorat terkait. Adapun 2023, terdapat 1.788 kapal yang terpantau di Kawasan konservasi sebagai berikut :



Pembinaan Pokmaswas



Target

1110

Kelompok



Realisasi

1345

Kelompok



Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU Fishing di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan/aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-prinsip sumber daya lestari, karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Untuk mengapresiasi kinerja swadaya serta inisiatif dari Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Ditjen PSDKP secara rutin memberikan penghargaan Pokmaswas Teladan tiap tahun. Penyerahan penghargaan Pokmaswas Teladan Tingkat Nasional Tahun 2023 disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada acara Rapat Koordinasi Nasional KKP di Bali.



Pengadaan Kapal Pengawas Kelas II



Kebutuhan kapal pengawas untuk mengcover pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terus dipenuhi secara bertahap setiap tahunnya.

Kapal pengawas kelautan dan perikanan harus memiliki kemampuan dan daya jelajah yang tinggi dan daya manuver serta kecepatan yang tinggi untuk melakukan fungsi penghentian, pemeriksaan dan penahanan terhadap kapal perikanan.

Pembangunan kapal pengawas yang diselesaikan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 2 unit kapal pengawas dengan ukuran 50 meter atau masuk kedalam kelas II, pembangunannya dilakukan secara tahun jamak (multi years contract) yang dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau selama 629 hari kerja. Pekerjaan pembangunan dilakukan oleh galangan PT. Palindo Marine, Batam, Kepulauan Riau.

Kedua kapal pengawas tersebut diberi nama kapal pengawas kelautan dan perikanan KP. Baracuda 01 dan KP. Baracuda 02.



Hibah Kapal Jepang

Pemerintah Jepang menghibahkan 2 kapal pengawas kepada Pemerintah Indonesia dalam kerangka kerja sama perikanan berdasarkan berdasarkan Exchange of Notes (ENs) tanggal 14 Februari 2020 dan ENs tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani perwakilan kedua Pemerintah.

Kapal pengawas yang dihibahkan tersebut sebanyak 2 unit dengan panjang 60 meter yang sebelumnya digunakan sebagai kapal patroli Badan Perikanan Jepang yaitu Hakurei Maru dan Shirahagi Maru. Mengingat kedua kapal yang dihibahkan adalah kapal bekas, maka sebelum kedua kapal diserahkan kepada KKP, Pemerintah Jepang melakukan perbaikan/penyempurnaan kapal tersebut di galangan Jepang dengan alokasi anggaran JPY2,2 Miliar.

Selain perbaikan tersebut, calon pengguna yaitu Awak Kapal Pengawas (AKP) juga diberikan pelatihan atau familiarisasi di Jepang sebelum sepenuhnya dioperasikan oleh KKP

Pada tanggal 2 Oktober 2023 kedua kapal tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dengan ini diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta.

Kedua kapal tersebut memiliki stabilitas yang sangat baik sehingga penempatannya diprioritaskan untuk pengawasan dan penegakan hukum di perairan yang berhadapan langsung dengan laut lepas.



Pembangunan Speedboat Pengawas

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pengawasan berupa Speedboat pengawasan SDKP, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melaksanakan pengadaan 2 (dua) unit speedboat sebagai berikut :

1

PENGADAAN SPEEDBOAT 16 M FIBERGLASS



Pelaksana:

PSDKP Tarakan

Galangan Pembangun:

PT. Mutiara Fibrindo, Banten

Pengadaan speedboat pengawas yang memiliki panjang (LOA) 16 meter ini berlangsung mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 2 November 2023 di galangan PT. Mutiara Fibrindo, Tangerang, Prov. Banten dengan anggaran sebesar Rp 3.960.000.000,00. Pada tanggal 31 Oktober 2023 telah dilaksanakan official sea trial dengan hasil yang memuaskan, speedboat dapat mencapai kecepatan 37 knots

2

PENGADAAN URC 12 METER ALUMINIUM



Pelaksana :

PSDKP Bitung

Galangan Pembangun :

PT. Tri Ratna Diesel, Gresik

Pengadaan speedboat pengawas 12 meter ini berlangsung mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 18 Desember 2023 di galangan PT. Tri Ratna Diesel, Lamongan, Prov. Jawa Timur dengan anggaran sebesar Rp 5.400.000.000,00. Pada tanggal 17 Desember 2023 telah dilaksanakan official sea trial dengan hasil yang memuaskan, speedboat dapat mencapai kecepatan 55,2 knots.

Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP

Pembangunan prasarana pengawasan SDKP di UPT Ditjen PSDKP pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp15,4 Miliar terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu, Pembangunan prasarana pengawasan SDKP utama dan Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP pendukung. Adapun beberapa kegiatan terkena Blokir ABT sehingga pada tahun 2023, terlaksana beberapa kegiatan Pembangunan prasarana sebagai berikut :

Pembangunan Kantor PSDKP Makasar



Pengelola : **PSDKP Bitung**
Nilai kontrak : **Rp1,28 M**
Masa Kerja : **27 April - 26 Sept 2023**
Status Pekerjaan: **Selesai 100%**

Pembangunan Kantor PSDKP Maumere



Pengelola : **PSDKP Kupang**
Nilai kontrak : **Rp675 Juta**
Masa Kerja : **9 Agt - 6 Des 2023**
Status Pekerjaan: **Selesai 100%**

Pembangunan Kantor PSDKP Belawan Tahap 1



Pengelola : **PSDKP Belawan**
Nilai kontrak : **Rp2,29 M**
Masa Kerja : **1 Nov - 30 Des 2023**
Status Pekerjaan: **Selesai 100% (60% kontrak)**

Pembangunan Prasarana Pendukung Pengawasan SDKP

Pembangunan Pagar Lingkungan Satwas SDKP Pati



Pekerjaan dikelola oleh Stasiun PSDKP Cilacap dengan progres **pekerjaan telah 100%**

Pembangunan Pos Jaga Satwas SDKP Pati (Selesai)



Pekerjaan dikelola oleh Stasiun PSDKP Cilacap dengan progres **pekerjaan telah 100%**

Pembangunan Kantor PSDKP Belawan Tahap 1



Pekerjaan dikelola oleh Stasiun PSDKP Cilacap dengan progres **pekerjaan telah 100%**

Pemeliharaan dan Perawatan Armada Pengawasan

Ancaman pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan tidak dapat diprediksi kehadirannya, sehingga menuntut kesiapan kapal pengawas dalam kondisi yang siap dan laik sewaktu-waktu untuk dioperasikan. Kondisi kapal pengawas yang tidak memenuhi laik operasi dan laik laut akan membahayakan keselamatan personel dan meteriil serta mengurangi tingkat kesiap siagaan dalam menghadapi ancaman.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan operasi (operational readiness) seluruh kapal pengawas sehingga pemeliharaan dan perawatan (repair and maintenance) sangat berperan penting menjaga kondisi kapal tersebut.



Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas bertujuan untuk mempertahankan kondisi teknis kapal pengawas agar memenuhi standar laik laut dan laik operasi serta keamanan dan keselamatan kapal pengawas sesuai dengan ketentuan pelayaran. Kegiatan pemeliharaan kapal pengawas yang dilakukan pada tahun 2023 meliputi pemeliharaan dan perawatan prediktif, pencegahan dan darurat



16 ARMADA DOCKING

6 ARMADA REPOWERING

4 ARMADA OVERHAUL

Penyegaran Kemampuan Menembak



Ditjen PSDKP melalui Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada pada bulan November telah melaksanakan Kegiatan Penyegaran Kemampuan Teknis Menembak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 28 sd 29 November 2023, bertempat di Lapangan Tembak Marinir TNI AL Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengenalan dasar karakter dan tipe Senjata Api yang dimiliki Ditjen PSDKP. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut di fokuskan pada Prosedur teknis dalam penggunaan Senjata Api yaitu Menggunakan senapan laras panjang sikap tiarap dan duduk dengan jarak 100 meter, Menggunakan senjata laras pendek (pistol) presisi dengan jarak 15 meter serta menembak eksekutif (slow rapid) jarak 20 meter serta Prosedur pemahaman dalam bongkar pasang senjata api serta perawatan senjata api setelah selesai digunakan dan Tradisi Tongkat Komando Komandan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan.



Pembinaan Awak Kapal Pengawas



Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan 11 Pelatihan Sertifikasi Kepelautan dan 1 Peningkatan Ijazah berupa ANKAPIN/ ATKAPIN I. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Awak Kapal Pengawas dalam melaksanakan tugas menjaga sumber daya kelautan dan perikanan

No	Nama Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Lokasi Pelatihan
1	Advance Fire Fighting (AFF)	28 September - 07 Oktober 2023	25 Orang AKP	Binasena Maritim Traning Centre
2	Medical First Aid (MFA)			Binasena Maritim Traning Centre
3	Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)	08 - 17 Oktober 2023	25 Orang AKP	Binasena Maritim Traning Centre
4	Ship Security Officer (SSO)			Binasena Maritim Traning Centre
5	Secure Awareness Training (SAT)	20 - 26 November 2023	32 Orang AKP	Binasena Maritim Traning Centre
6	Medical Care (MC)			Binasena Maritim Traning Centre
7	Secure Awareness Training (SAT)	27 November - 3 Desember 2023	38 Orang AKP	Binasena Maritim Traning Centre
8	Medical Care (MC)			Binasena Maritim Traning Centre
9	Secure Awareness Training (SAT)	11 - 17 Desember 2023	23 Orang AKP	Binasena Maritim Traning Centre
10	Advance Fire Fighting (AFF)			Binasena Maritim Traning Centre
11	Medical First Aid (MFA)	22 - 24 November 2023	18 Orang AKP	Binasena Maritim Traning Centre
12	ANKAPIN/ATKAPIN I	13 - 29 November 2023	23 Orang AKP	BPPI Tegal

Pengadaan Senapan Mesin Kaliber 12, 7 mm



Dalam rangka mendukung kebijakan Ekonomi Biru Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP melaksanakan pengadaan Senapan Mesin Kaliber 12,7 mm untuk menunjang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya pada saat kegiatan Penghentian, Pemeriksaan, dan Penahanan (Henrikhan) terhadap kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Pengadaan Senapan Mesin tersebut merupakan produk dalam negeri yang diproduksi oleh PT Pindad.



Kaliber
Berat
Panjang

Sistem Kerja
Mode Tembak
Kecepatan Tembak
Jarak Tembak

SPESIFIKASI

: 12,7 x 99 mm
: 34,5 Kg
: a. Senjata : 1680 ± 5 mm
: b. Laras: 1140 ± 0,8 mm
: Gas Operated, Otomatis
: Semi Otomatis dan Otomatis Penuh
: 400-650 butir/menit
: 1830 m

Penanganan & Pelanggaran

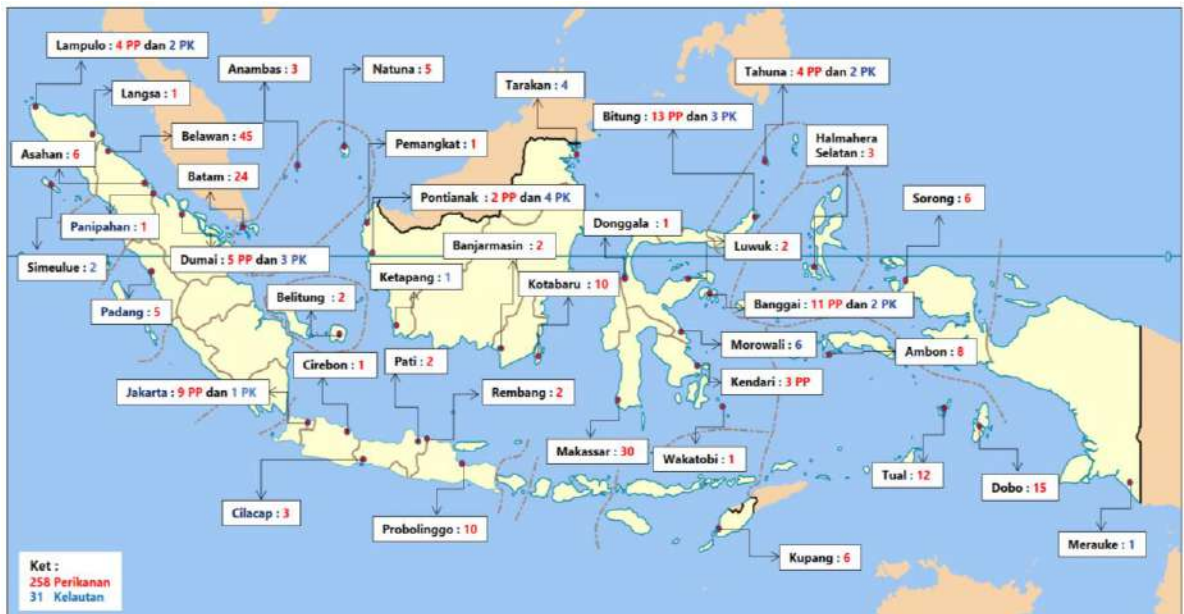


Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan

Penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan terus diupayakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Tahun 2023 telah ditangani 289 kasus yang terdiri dari 258 kasus Tindak Pidana bidang Perikanan dan 31 kasus Tindak Pidana bidang Kelautan. Sebanyak 217 kasus diproses sanksi Administratif dan 15 kasus penanganan dilimpahkan ke pemerintah daerah serta 56 berkas kasus diproses secara pidana.

Dari 56 kasus, 22 kasus tindak pidana kelautan yang sebagian besar pelanggaran dengan menggunakan bahan peledak dan 34 kasus tindak pidana perikanan dengan pelanggaran terbanyak menangkap ikan tanpa dokumen yang lengkap dan sah

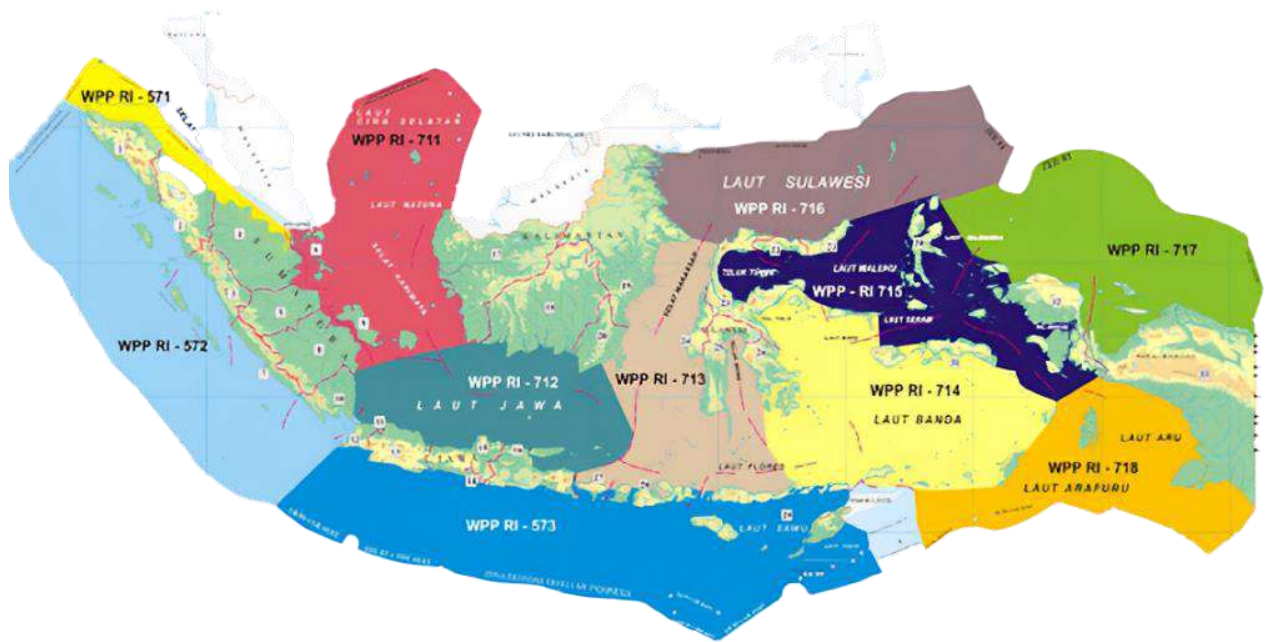




Sebaran Lokasi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang ditangani sebanyak 289 kasus, dengan rincian 31 kasus pelanggaran bidang kelautan dengan jenis pelanggaran menggunakan bahan peledak, setrum ikan, dan pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam tanpa izin.

Sedangkan 258 kasus pelanggaran bidang perikanan, jenis pelanggaran meliputi penangkapan ikan tanpa izin, tidak sesuai dengan jalur penangkapan, tidak sesuai dengan dokumen perizinan maupun pemalsuan dokumen



Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI)

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang paling tinggi jumlah kasus yang ditangani berasal dari hasil tangkapan Kapal Pengawas di WPPNRI 571 sejumlah 66 Kasus, kemudian WPPNRI 713 sejumlah 43 dan WPPNRI 711 sejumlah 41 kasus.

Penanganan Kapal Pelaku Pelanggaran Bidang TPKP

287
Unit

269
Unit

Tangkapan
Kapal Pengawas
Kelautan dan
Perikanan

18
Unit

Tangkapan di luar
Kapal Pengawas
Kelautan dan
Perikanan

Daftar Tangkapan Berdasarkan Negara

274 Kapal Perikanan

 Indonesia (252)

 Malaysia (15)

 Vietnam (7)

 Filipina (7)

 Netherland (1)

Tahun 2023, Ditjen PSDKP menangani **287** kapal pelaku pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Sebanyak **269** kapal merupakan hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan dan **18** kapal hasil operasi aparat penegak hukum lainnya seperti, Bakamla, Polair Polri dan Dinas Kelautan dan Perikanan daerah.

Barang Bukti

Kapal Perikanan

Terdapat 5 kapal ikan asing (KIA) hasil tangkapan operasi kapal pengawas kelautan dan perikanan yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Kelima kapal tersebut berasal dari Vietnam.

Proses pemanfaatan kapal ikan asing (KIA) tersebut dengan cara dihibahkan kepada unit usaha/koperasi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Berikut daftar kapal perikanan yang dihibahkan.



TG 94916 TS-GT.80

Pangkalan PSDKP
Batam



KG 9464 TS-GT. 72

Pangkalan PSDKP
Pontianak



BV 92602 TS-GT.124

Pangkalan PSDKP
Pontianak



BV 92601 TS-GT.72

Pangkalan PSDKP
Pontianak



KG 9269 TS-GT.85

Pangkalan PSDKP
Pontianak

Sebaran Awak Kapal Asing

Sebaran penanganan awak kapal asing yang masih dalam penanganan Ditjen PSDKP sejumlah 89 awak kapal dari jumlah tersebut 22 orang masih menjalani proses pidana, 19 orang masih menjadi saksi, 48 orang siap untuk dipulangkan. Sebanyak 63 orang berasal dari Vietnam, 14 berasal dari Indonesia dan 6 dari Filipina



KEWARGA- NEGARAAN	TERSANGKA/ TERDAKWA/ TERPIDANA	NON JUSTITIA		JUMLAH
		SAKSI	SIAP DIPULANGKAN	
INDONESIA	10	4	-	14
MYANMAR	2	-	-	2
VIETNAM	4	12	47	63
LAOS	1	-	-	3
MALAYSIA	3	-	-	3
FILIPINA	2	3	1	6
TOTAL	22	19	48	89

Awak Kapal yang Ditangani Per UPT



NO	UPT	ABK WNA			ABK WNI		
		JUML TER-TANGKAP	DIPULANG-KAN	BELUM DIPULANG-KAN	JUML TERTANG-KAP	DIKELUAR-KAN	BELUM DIKELUAR-KAN
1	Lan PSDKP Lampulo	-	-	-	27	23	4
2	Lan PSDKP Batam	172	108	64	-	-	-
3	Lan PSDKP Jakarta	-	-	-	-	-	-
4	Lan PSDKP Bitung	13	13	-	20	17	3
5	Lan PSDKP Benoa	-	-	-	-	-	-
6	Lan PSDKP Tual	-	-	-	-	-	-
7	Sta. PSDKP Belawan	24	22	2	13	12	1
8	Sta. PSDKP Pontianak	16	16	-	5	5	-
9	Sta. PSDKP Tarakan	3	-	3	41	35	6
10	Sta. PSDKP Cilacap	-	-	-	-	-	-
11	Sta. PSDKP Tahuna	16	10	6	5	5	-
12	Sta. PSDKP Kupang	-	-	-	-	-	-
13	Sta. PSDKP Ambon	-	-	-	-	-	-
14	Sta. PSDKP Tual	-	-	-	-	-	-
TOTAL		244	169	75	111	97	14

UPT Pangkalan PSDKP Batam menjadi UPT yang paling banyak menangani awak kapal baik WNI maupun WNA, kemudian disususul oleh Stasiun PSDKP Tarakan dan Stasiun PSDKP Belawan

Penanganan Nelayan Pelintas Batas

NO	NEGARA PENANGKAP	JUMLAH NELAYAN YANG DITANGANI		JUMLAH NELAYAN YANG DIPULANGKAN		BELUM DIBEBASKAN / DITAHAN / DIPROSES HUKUM / MENUNGGU PEMULANGAN	Ket.
		TERTANGKAP SEBELUM 2023 (PROSES HUKUM)	TERTANGKAP TAHUN 2023	TERTANGKAP SEBELUM 2023 (PROSES HUKUM)	TERTANGKAP TAHUN 2023		
1	MALAYSIA	106	68	6	6	162*	* 161 orang dari Sumatera Utara dan 1 orang dari Natuna Lokasi Proses Hukum: a. Perak 50 orang; b. Penang 94 orang; c. Kucing 1 orang; d. Langkawi 13 orang; e. Selangor 2 orang; f. Kuala Rau 2 orang;
2	THAILAND	1	69	1	-	69*	* 69 orang berasal dari Aceh Timur; Lokasi proses Hukum di Songkhla
3	AUSTRALIA	-	64	-	60	4*	* 4 orang tertangkap pada tanggal 12 Des 2023 (PM Akmal Jaya dan PM 77)
4	PAPUA NUGINI	21	29	20	28	2*	*2 orang nelayan dari Merauke Lokasi proses Hukum di Port Moresby
JUMLAH		128	230	27	94	237	
JUMLAH TOTAL		358		121		237	



Penanganan Sanksi Administratif

Bidang	Jumlah Kasus	Sanksi Adminsitratif			Keterangan
		SP1	SP2	Denda	
Pengeloaan Sumber Daya Kelautan	51	7	0	44	16 dari 44 kasus yang dikenakan denda juga diberikan paksaan pemerintah (penghentian sementara kegiatan)
Pengeloaan Sumber Daya Perikanan	1.126	785	243	150	- 327 kasus hasil operasi pengawaan - 799 kasus hasil analisis SPKP
Jumlah	1.177	792	243	194	

Seperti yang diamanatkan dalam UU CK tidak lagi berorientasi pada pemedanaan, namun juga terdapat pada sanksi administrasi yang menjadi tumpuan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul, sedangkan sanksi pidana dijadikan sebagai senjata pamungkas (*ultimum remidium*) karena sifatnya yang keras, kejam dan memiliki implikasi yang sangat serius bagi setiap orang. Terlebih lagi telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, yang akan diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri KP tentang Penerapan Sanksi Administrasi.



PSDKP Bongkar Sindikat Pemalsuan Dokumen Kapal



Pemalsuan dokumen perizinan tindak pidana perikanan berhasil diungkap oleh PPNS Perikanan Direktorat Penanganan Pelanggaran dan Stasiun PSDKP Cilacap pada rentang waktu akhir tahun 2022 s.d awal tahun 2023;

Penyidikan ini merupakan hasil pengembangan kasus penggunaan dokumen berusaha palsu KM. berpapan nama sebagai KM. Marga Rena-1 dengan Tersangka I Rudi Ananto dan Tersangka II Mochammad Arifin Wibowo dimana keduanya disangkakan Pasal 27 angka 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dimana kasus tersebut telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2022. Berdasarkan keterangan kedua pelaku, didapat nama Taufik yang berperan menyewakan dokumen tersebut kepada kedua pelaku atau dikenal sebagai mediator/makelar;

Berdasarkan hasil pengembangan kasus terhadap Taufik, didapatkan pelaku lainnya yaitu atas nama SN yang merupakan oknum pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pelaku RG yang berperan sebagai pembuat dokumen perizinan perikanan palsu. Maka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan atas petunjuk P-19 Jaksa terhadap berkas perkara Tersangka Taufik, maka Sdr. SN ditetapkan sebagai tersangka oleh PPNS Perikanan sejak tanggal 14 Februari 2023.



Pada tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, berdasarkan hasil analisis tracking alat telekomunikasi Tersangka SN dalam pergerakan kearah Wilker PSDKP Batang. Oleh karena itu Tim bergerak ke Batang dan Tersangka SN ditangkap di Kantor Wilker PSDKP Batang oleh Tim PPNS Perikanan dari Dit. Penanganan Pelanggaran dan Stasiun PSDKP Cilacap dibantu oleh Satresmob Mabes Polri.



Secara kooperatif, Tersangka SN bersedia untuk dibawa menuju Kantor Satwas PSDKP Pati untuk dilakukan pemeriksaan. Tim PPNS Perikanan juga melakukan penggeledahan terhadap 2 rumah, 1 kafe dan 1 mobil milik Tersangka Sdr. SN. Untuk selanjutnya, Tersangka Sdr. SN dilakukan penahanan di Rutan Polresta Pati guna dilakukan proses penyidikan;



Terhadap pelaku RG, yang sebelumnya ditahan di Polres Depok karena kasus pemalsuan uang, didatangkan menuju Rutan Pati berdasarkan koordinasi dengan KemenKum HAM dan Rutan Kelas II Depok untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Pati untuk disidangkan.



Terhadap Tersangka SN dan RG telah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) pada tanggal 4 April 2023.

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan Tingkat Daerah Tahun 2023 dengan Tema Penegakkan Hukum Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

- Jawa Barat, 16 Maret 2023, Bandung, DKP Jawa Barat;
- Lampung, 12 Juli 2023, Bandar Lampung, DKP Lampung;
- Kalimantan Tengah, 1 Agustus 2023, Palangkaraya, PSDKP Pontianak;
- Jawa Barat, 10 Agustus 2023, Bandung, PSDKP Jakarta;
- Kalimantan Utara, 13 September 2023, Tarakan, PSDKP Tarakan;
- Sulawesi Selatan, 19 Oktober 2023, Makassar, PSDKP Bitung;
- Maluku Utara, 2 November 2023, Ternate, PSDKP Ambon;
- Nusa Tenggara Timur, 25 Mei 2023, Labuan Bajo, PSDKP Kupang;
- Aceh, Juni 2023, Banda Aceh, DKP Aceh;
- Papua Selatan, 9 Agustus 2023, Merauke, PSDKP Tual;
- Papua Barat, 29 Agustus 2023, Manokwari, PSDKP Biak;
- Kalimantan Timur, 12 Oktober 2023, Balikpapan, DKP Kalimantan Timur;
- Jawa Timur, 24 Oktober 2023, Surabaya, PSDKP Benoa;
- Aceh, 27 November 2023, Meulaboh, Aceh Barat, PSDKP Lampulo



Provinsi Maluku Utara



Forkor TPKP sebagai media koordinasi dan komunikasi antar aparat penegak hukum, perubahan paradigma penegakan hukum pasca UU Cipta Kerja, dan peran Ditjen PSDKP dalam mengawal Kebijakan dan Program Prioritas MKP.

Tujuan pelaksanaan forum ini di Maluku Utara yakni untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antar aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan pasca terbitnya UU Cipta Kerja serta mendorong Pemprov Maluku Utara dalam menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja khususnya terkait pengenaan sanksi administrative.

Provinsi Aceh



Output Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo pada tanggal 27 November 2023 di Eva Sky Hotel, Meulaboh Kab. Aceh Barat.

Maksud kegiatan ini agar terlaksananya fungsi Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Provinsi Aceh, dengan tujuan Meningkatkan sinergisitas antara aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Penyadartahuan Nelayan

Untuk Tidak Melintas Batas dan Menangkap Ikan di Wilayah Negara Lain Tahun 2023



Dilaksanakan di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN Merauke),



150 orang peserta

Kegiatan dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan yang sekaligus mewakili PJ Gubernur Papua Selatan, Perwakilan KBRI untuk Papua Nugini, Forkopimda Merauke, Hakim Adhoc Perikanan, Perwakilan Lantamal XI Merauke, Polres Merauke, OPD Kabupaten Merauke, Kepala PPN Merauke, Ketua HSNI.

Tujuan kegiatan :

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para nelayan, keluarga nelayan, pemilik kapal dan/atau pemodal, khususnya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan agar tidak menangkap ikan di wilayah perairan negara lain tanpa izin,
- Penandatanganan "Piagam Kesepakatan Bersama" oleh Nelayan dan Pemilik Kapal untuk tidak melaut melintas batas negara lain dan tidak menangkap ikan secara illegal di perairan negara lain, dan
- Penyerahan dokumen SIPI migrasi izin daerah ke izin pusat ke pelaku usaha perikanan

Penyadartahuan Nelayan

Kegiatan *Public Information Campaign* (PIC) di Kupang lokasi Pelabuhan Oeba

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yakni Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Bekerjasama dengan Australia melalui perantara AFMA (*Australian Fisheries Management Authority*) untuk bersama-sama menekan dan mengurangi angka nelayan yang melintas batas dan menangkap ikan di negara lain terkhusus Australia.

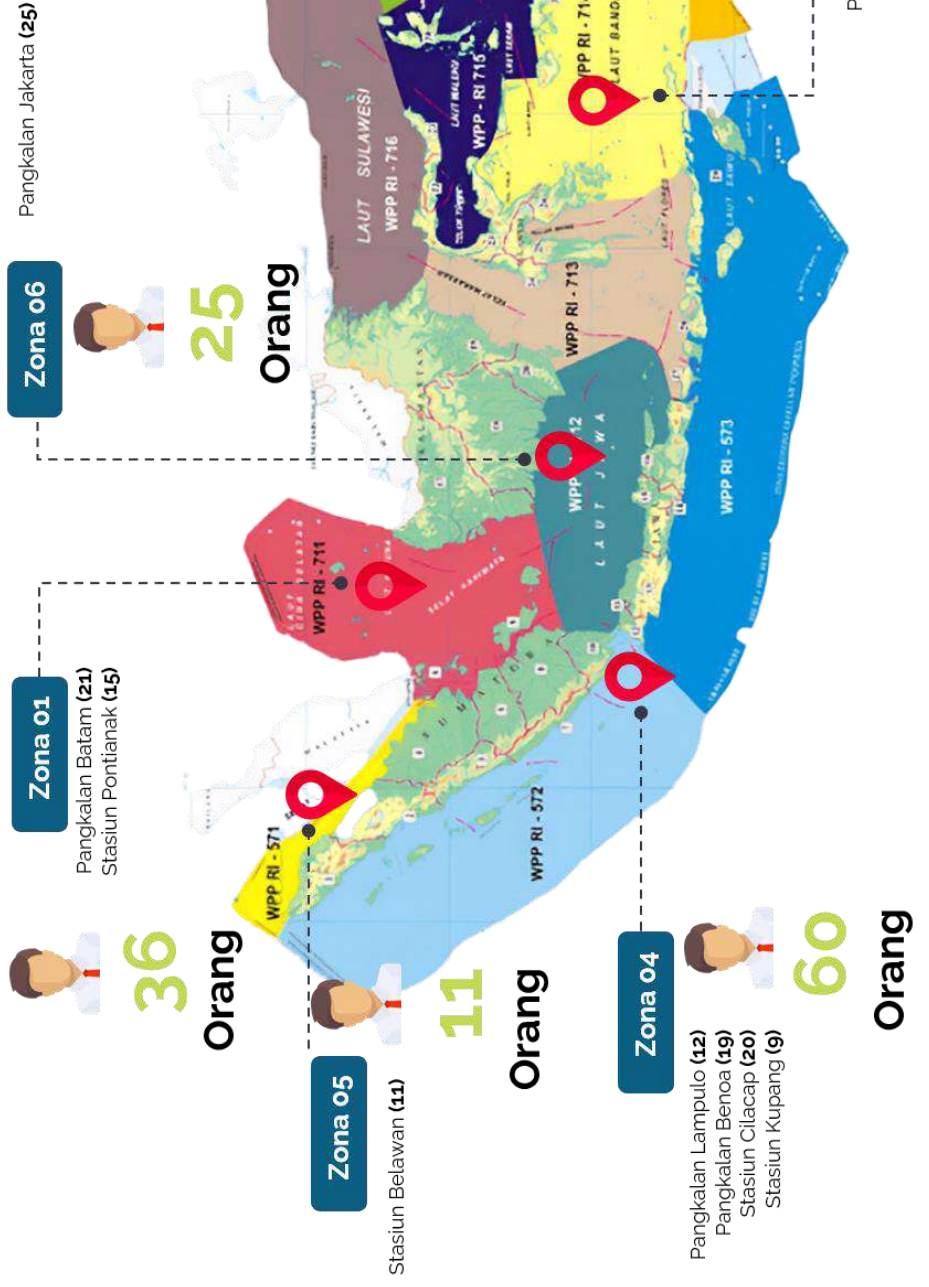


- Melalui kegiatan ***Public Information Campaign* (PIC)** Hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kupang dan dihadiri oleh 60 peserta nelayan/istri nelayan. Metode kegiatan kombinasi antara penyampaian materi dan kuis berhadiah, dengan pembicara berasal dari AFMA, Ditjen PSDKP, Kadis KP NTT, dan Dit PP.
- AFMA menyampaikan tentang perbatasan perairan Indonesia-Australia termasuk hal yang dilarang dan diperbolehkan di area MoU Box
- Direktorat penanganan pelanggaran menyampaikan kasus-kasus nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri termasuk di Australia, serta meminta nelayan untuk mematuhi peraturan yang berlaku termasuk kesepakatan batas Indonesia-Australia

Sebaran PPNS Perikanan

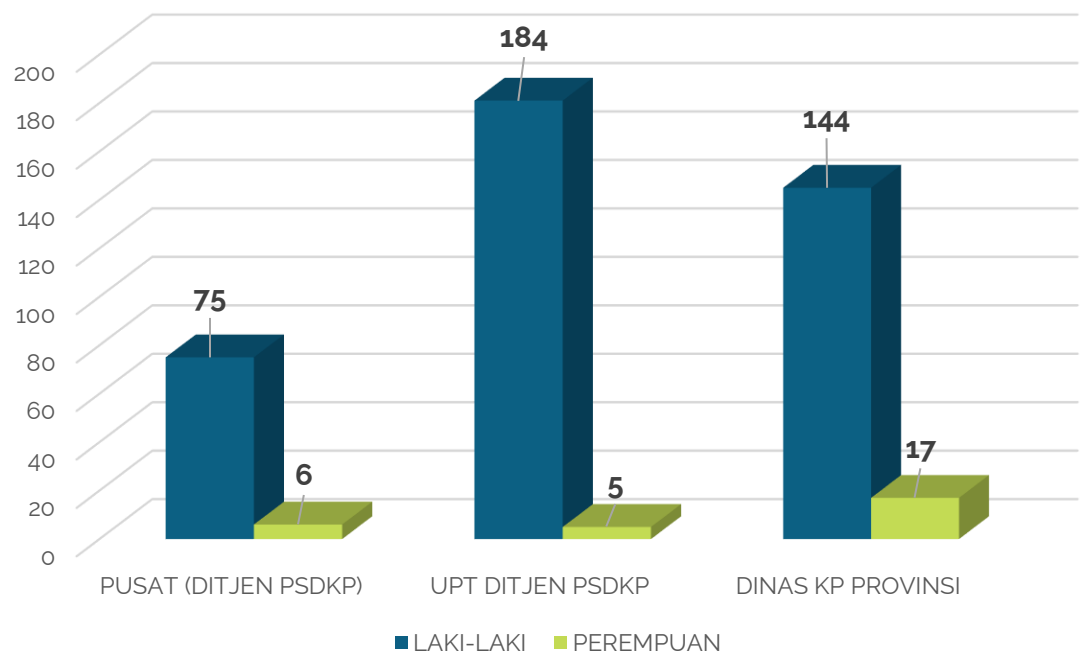
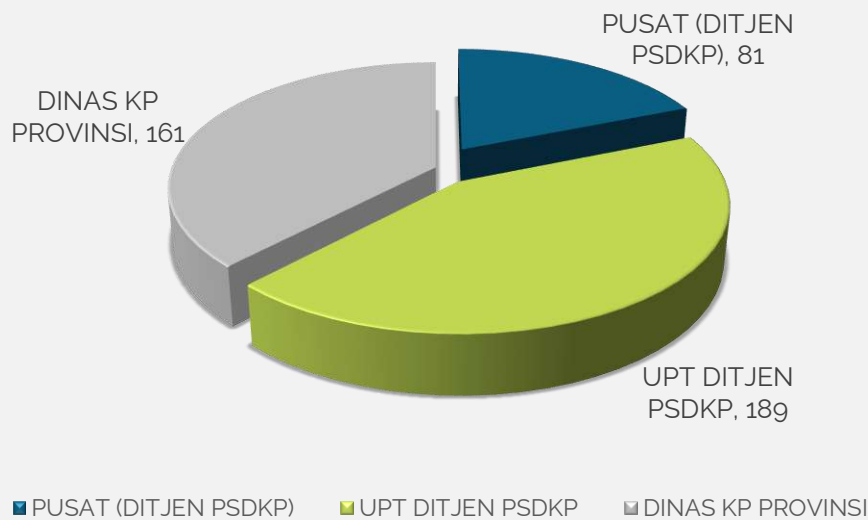


Keterangan:

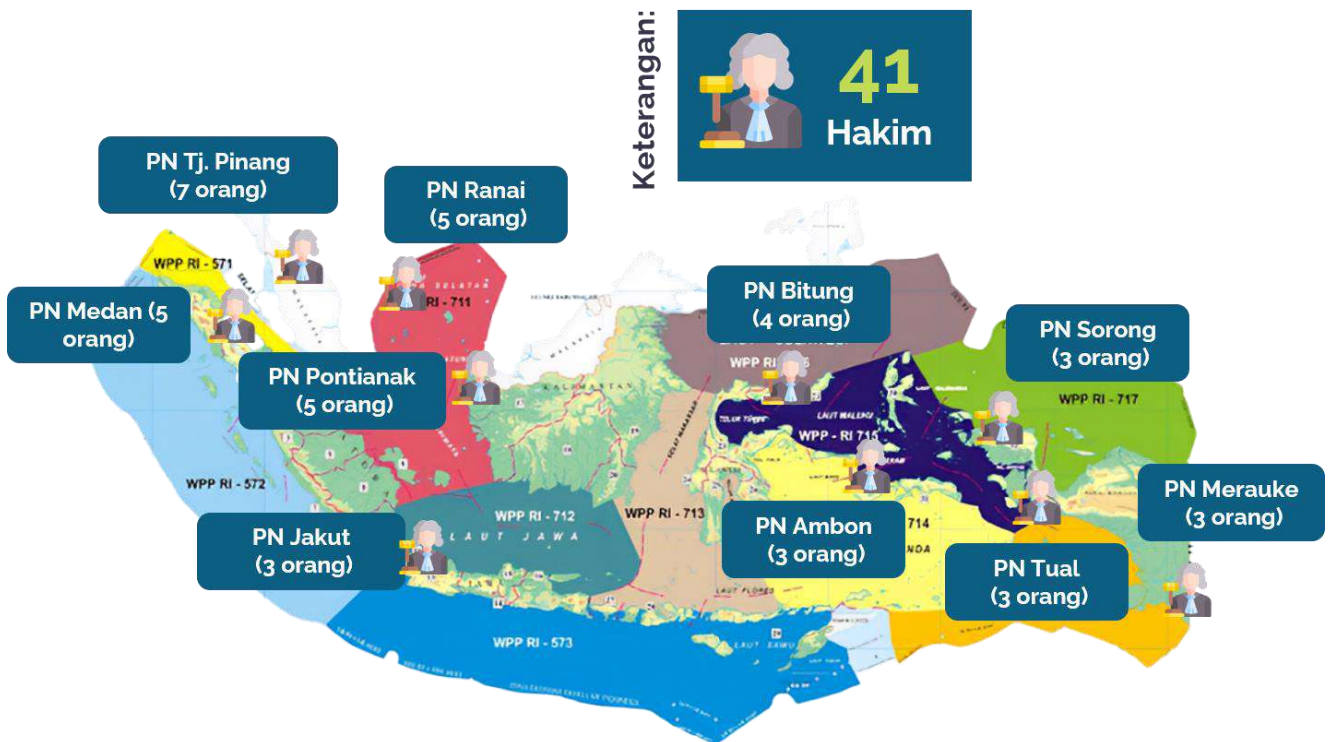


Rekapitulasi PPNS Seluruh Indonesia

Rekapitulasi Sebaran PPNS di Seluruh Indonesia



Sebaran Pengadilan Perikanan Hakim AdHoc



Tahun 2023 terdapat 41 hakim adhoc perikanan yang tersebar di 10 Pengadilan Perikanan seluruh Indonesia

Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Lingkup Regional

Direktorat Penanganan Pelanggaran ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan lingkup regional guna meningkatkan kapasitas SDM penegak hukum. Kegiatan yang diikuti diantaranya:



Keynote Speech Direktur Jenderal PSDKP pada Financial Investigation Training UNODC Hotel Aryaduta Jakarta, 27 Maret 2023

Financial Investigation Training dan Financial investigation training .

Diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan United Office on Drugs and Crime (UNODC), pada tanggal 27-29 Maret 2023 di Hotel Aryaduta Jakarta



Counteracting Cyber Security Threats to Maritime Law Enforcement Agencies Training (22-23 Mei 2023) di Sheraton Mustika Yogyakarta. Pokok bahasan mengenai keamanan cyber



ASEAN SENIOR OFFICIALS MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (23rd ASEAN SOMTC) (19-23 Juni 2023) di Yogyakarta Peserta perwakilan negara ASEAN serta negara pengamat, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Korsel, sebagai perwakilan negara mitra. PSDKP berkontribusi dengan memberikan data terkait tindak pidana kelautan dan perikanan saat penyusunan kertas posisi Indonesia 23rd ASEAN SOMTC

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan & Penegak Hukum



Kegiatan dihadiri oleh 331 orang peserta yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian/Lembaga, antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Kepolisian Republik Indonesia, TNI-AL, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Keamanan Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pusat Pemulihan Aset Dan Transaksi Keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyamakan persepsi antar pengawas kelautan dan perikanan serta aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan Pusat dan Daerah dalam mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Adapun tujuannya untuk terlaksananya sinergi antar pengawas kelautan dan perikanan serta aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan Pusat dan Daerah dalam mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Coaching Clinic PPNS



Maksud kegiatan *Coaching Clinic PPNS* Bidang KP adalah untuk memberikan pemahaman kepada PPNS-KP terkait perubahan hukum acara pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyidikan yang dilakukan oleh PPNS-KP terlaksana dengan tertib dan administrasi penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana guna menghindari praperadilan.



Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah menyamakan persepsi antar pengawas kelautan dan perikanan serta aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan Pusat dan Daerah dalam mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Adapun tujuannya untuk terlaksananya sinergi antar pengawas kelautan dan perikanan serta aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan Pusat dan Daerah dalam mengawal kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Hukum & Kerjasama



Produk Regulasi Pengawasan SDKP Tahun 2024

Dalam rangka dukungan pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Biru, dilakukan penguatan SDM dengan membuat dasar hukum sebagai pedoman dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Telah ditetapkan 6 (Enam) Peraturan MKP tentang:



6
Permen KP

1. PERMEN KP No.8 Th 2023 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas Perikanan
2. PERMEN KP No.9 Th 2023 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Asisten Pengawas Perikanan
3. PERMEN KP No.10 Th 2023 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Pengawas Kelautan
4. PERMEN KP No.11 Th 2023 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan JF Asisten Pengawas Kelautan
5. PERMEN KP No.12 Th 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian
6. PERMEN KP No.12 Th 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan melalui Penyesuaian

64
Kepdirjen KP

Bersinergi Guna Melesat Cepat & Berkembang Pesat

Direktorat Jenderal PSDKP berperan penting sebagai benteng KKP untuk mengawal pencapaian agenda prioritas KKP dengan lima kebijakan dalam sebuah konsep besar yang disebut Ekonomi Biru. Layaknya melewati sebuah perjalanan, Direktorat Jenderal PSDKP membutuhkan “kawan seperjalanan” agar perjalanan terasa semakin menyenangkan hingga tiba di lokasi tujuan. Kawan yang sanggup bahu-membahu melewati rintangan. Kawan yang siap sedia saling membantu demi menggapai tujuan.

Sinergi Lintas Sektor Dalam Negeri

Guna terwujudnya kinerja organisasi yang optimal dalam mencapai tujuan, maka dibutuhkan dukungan multi pihak yang salah satunya berasal dari dalam negeri. Jalinan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal PSDKP sepanjang tahun 2023 berupa 14 dokumen kerja sama dengan pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah (Pemda), institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Peningkatan jalinan kerja sama dengan Pemda telah dilakukan bersama DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Direktorat Jenderal PSDKP turut membangun kerja sama dengan Universitas Cenderawasih, Universitas Hang Tuah, Universitas Hasanuddin, dan Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara (Rekam Jejak).

Kerja Sama Dalam Negeri



NTT
25 Januari



DKI Jakarta
12 Februari



Rekam Jejak
1 Maret



Sulsel
2 April



Sultra
21 Juli



Uncen
10 April



Sulbar
6 April



Sulteng
4 April



Kep. Babel
22 Agustus



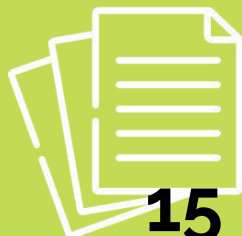
DI Yogyakarta
5 September



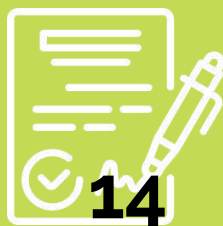
Sumsel
20 Oktober



UHT
15 November



15
Disusun



14
Ditandatangani



Sumut
15 November



Unhas
20 Oktober

	DKP NTT	Mitra	DKPKP DKI Jakarta	
	PKS (3 tahun)	Dokumen	PKS (5 tahun)	
	s.d. 24 Jan 2026	Masa Berlaku	s.d. 16 Feb 2028	

	Rekam Jejak	Mitra	DKP Sulsel	
	PKS (2 thn 9 bln)	Dokumen	PKS (2 tahun)	
	s.d. 30 Nov 2025	Masa Berlaku	s.d. 2 Apr 2025	

	DKP Sulteng	Mitra	DKP Sulbar	
	PKS (5 tahun)	Dokumen	PKS (5 tahun)	
	s.d. 3 Apr 2028	Masa Berlaku	s.d. 5 Apr 2028	

	Fakultas MIPA	Mitra	DKP Sultra	
	PKS (2 tahun)	Dokumen	PKS (5 tahun)	
	s.d. 9 Apr 2025	Masa Berlaku	s.d. 30 Jul 2028	

	DKP Kep. Babel	Mitra	Pemda D.I.Y	
	PKS (5 tahun)	Dokumen	NK (5 tahun)	
	s.d. 21 Agt 2028	Masa Berlaku	s.d. 4 Sep 2028	

	DKP Sumsel	Mitra	Fakultas Hukum	
	PKS (2 tahun)	Dokumen	PKS (5 tahun)	
	s.d. 29 Okt 2025	Masa Berlaku	s.d. 14 Nov 2028	

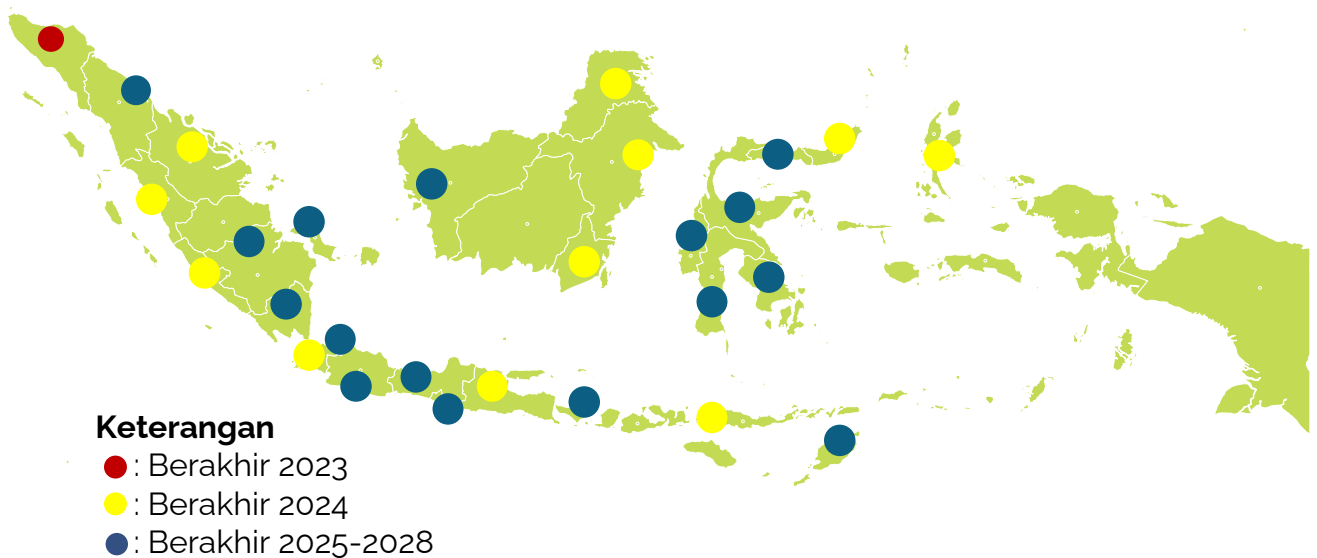
	Fakultas Ilmu KP	Mitra	DKP Sumut	
	PKS (5 tahun)	Dokumen	PKS (2 tahun)	
	s.d. 6 Des 2028	Masa Berlaku	s.d. 21 Des 2025	

Keterangan:

NK: Nota Kesepakatan

PKS: Perjanjian Kerja Sama

Status Masa Berlaku Perjanjian Kerja Sama Ditjen PSDKP



Implementasi Kerja Sama Ditjen PSDKP & Mitra Tahun 2023



Pemberian pemahaman kepada Nelayan di Kab. Merauke



Forum Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) Maluku Utara



Diklat Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi PPNS Perikanan di Jakarta



Identifikasi barang bukti dugaan TPKP di Probolinggo



Patroli bersama Satwas SDKP Balikpapan dan DKP Kalimantan Timur



Pertemuan pembinaan Pokmaswas di Jakarta Utara



Patroli laut Pangkalan PSDKP Benoa dan DKP Bali



Bimtek Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Belawan



Operasi laut interdiksi terpadu "PURNAMA" di Sorong

Langkah Kolaboratif Kancah Internasional

Sejalan dengan peran aktif Pemerintah Indonesia di forum regional dan internasional, khususnya bidang kelautan dan perikanan, maka Direktorat Jenderal PSDKP berupaya menjalin kerja sama serta melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang berasal dari luar negeri. Salah satu pihak tersebut yaitu Pemerintah Australia yang telah merintis kerja sama sejak tahun 2007 dalam kerangka *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)*.

Kerja sama *IAFSF* adalah forum kerja sama pengawasan perikanan antara Indonesia dan Australia yang bertujuan mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan *IUU Fishing* di perairan perbatasan ZEE kedua negara. Instansi yang dilibatkan oleh pihak Australia dalam forum kerja sama ini yaitu *Australian Border Force (ABF)* dan *Australia Fisheries Management Authority (AFMA)*.



1

Partisipasi dan komitmen terhadap kegiatan multi-lembaga di bawah naungan Operasi *GANNET*

2

Peluang bagi staf KKP mengikuti kursus atau pelatihan di *AFMA*, *ABF*, dan *ANCORS*

3

Pertemuan bilateral antar pimpinan untuk memfasilitasi hubungan dan kerja sama yang lebih erat antara Australia dan Indonesia dalam masalah penegakan hukum perikanan

4

Kegiatan bilateral untuk mendukung pengembangan kesadaran maritim bersama

5

Menjajaki peluang kegiatan kampanye publik atas isu yang terkait perikanan

6

Forum pertemuan *IAFSF* secara rutin

Lini Masa Kerja Sama Internasional



Mei

Patroli Terkoordinasi Bilateral dengan sandi "Operation GANNET 7 Tahun 2023"



Juni

Kampanye publik pencegahan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Australia, kerja sama dengan pemerintahan Australia



September

Bilateral Consultation of Indonesia and Timor Leste to Strengthen Cooperation on Transboundary Issues of Fisheries, Marine Habitat Management, and Combating IUU Fishing



November

Workshop for Fisheries Enforcement Strategies to Prevent, Combat, and Deter IUU Fishing Related to Covid-19 Pandemic

Kerja Sama Dengan Mitra

Kerja Sama Luar Negeri



1. *The Wildlife Trafficking Cybercrime Program*
2. Tindak Lanjut Pelatihan bagi Penyidik Perdagangan Satwa Liar
3. Pelatihan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut dan Penegakan Regulasi Maritim
4. *Inaugural Women in Maritime Security Program*
5. *Intensive Course on Vessel Behavior Modelling and Expert Consultative Workshop*
6. *Executive Leadership and Major Case Management*
7. *Natural Resource Crime Investigations Course (Session1)*
8. *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) Training Course*
9. *Civil Maritime Leadership Program*
10. *Course Program Policies and Countermeasures Against IUU Fishing*
11. *Regional Civil Maritime Security Workshops – SE Asia*
12. Lokakarya Intelijen dan Penargetan Maritim Sipil
13. *Maritime Domain Awareness Foundation Courses Training*
14. *The 8th Women in Maritime Law Enforcement Forum*
15. Pelatihan Analisis Intelijen Maritim
16. *English Language Program*
17. Lokakarya Intelijen dan Penargetan Maritim Sipil
18. *Country Focused Training for Countermeasures Against IUUF*
19. *Maritime Investigation Training focusing on Drugs Smuggling*
20. *Fisheries Enforcement and Prosecution Course: Session 2*
21. *Civil Maritime Security Program (CMSP)*
22. *Maritime Security Desktop Exercise*
23. Lokakarya Keterampilan Investigasi Penyelundupan Manusia & Perdagangan Orang
24. *Frontline Women's Leadership Program*
25. Lokakarya Keamanan Maritim Sipil
26. *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS) Training Course*
27. *Women in Law Enforcement ke-9*
28. *Civil Maritime Leadership*

Implementasi Kerja Sama Sekretariat *RPOA-IUU*



Terus Berkiprah di Forum Regional

Selama hampir tujuh belas tahun berdiri, *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-IUU)* senantiasa hadir dengan 11 negara anggotanya mengawal komitmen bersama dalam mewujudkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab di kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, seluruh negara anggota masih mempercayakan posisi Sekretariat *RPOA-IUU* diemban oleh Indonesia. Sekretariat *RPOA-IUU* melaksanakan kegiatan tahunan meliputi pertemuan *Coordination Committee Meeting (CCM)*, *Consultative Meeting (CM)*, *Workshop/FGD/Pelatihan/Seminar*, atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama *RPOA-IUU*.

Mitra Kerja Sama *RPOA-IUU*



Focus Group Discussion on Data Sharing Mechanism and MCS Curriculum Training Needs



MCS Sub-Regional Groups Workshop di Bali



RPOA-IUU Consultative Meeting di Bali



FGD on Fisheries Intelligence

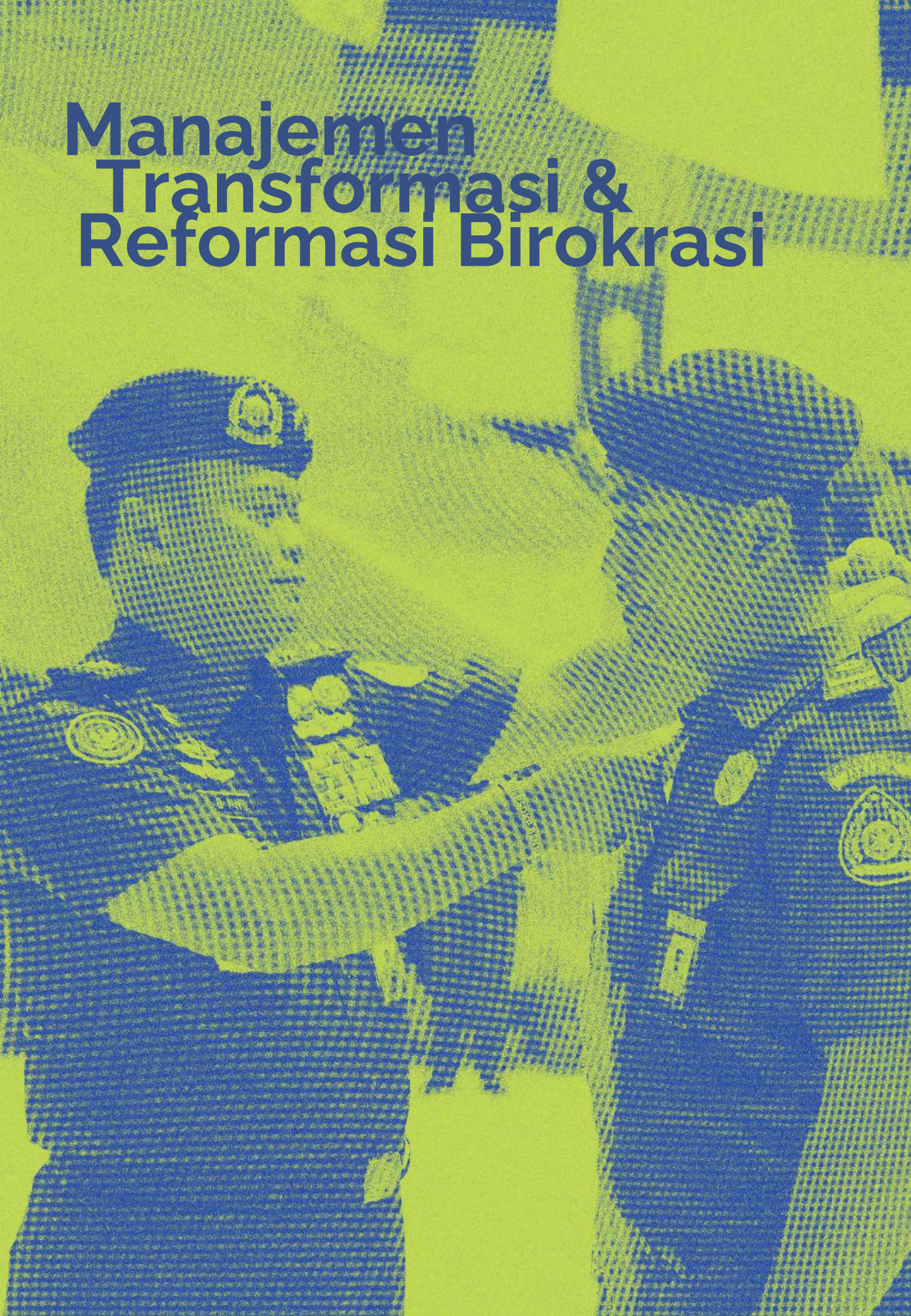


The 12th RPOA-IUU MCS Sub-Regional Arafura and Timor Sea di Bali



The 16th RPOA-IUU Coordination Committee Meeting (CCM) di Dili, Timor Leste

Manajemen Transformasi & Reformasi Birokrasi



Inovasi Tiada Henti

Kesuksesan program **HIU (Hasilkan Inovasi Unit Kerja)** yang dilaksanakan sejak tahun 2020 terus berlanjut setiap tahunnya hingga di tahun 2023. Para Agen Perubahan melanjutkan proses improvement secara terus (*countinuos improvement*) atas pekerjaannya untuk menghasilkan karya inovasi dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan.

Lomba Inovasi yang digelar tanggal 14 -15 Desember 2023 di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV, berhasil menciptakan 28 inovasi yang diusulkan pada unit kerja Pusat, Unit Pelaksana Teknis, serta perorangan/sumbang saran, dan dari masing-masing kategori pengusulan telah terpilih 3 terbaik. Lomba inovasi merupakan upaya Ditjen PSDKP untuk memotivasi Pegawai dan Unit Kerja untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme serta memberikan apresiasi bagi para inovator.

Dalam lomba inovasi, peserta diminta untuk mempresentasikan hasil inovasi dilingkungan kerjanya. Penilaian mengacu pada kriteria yang ditetapkan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Standarisasi, dan Dampak. Penilaian dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidangnya yang terdiri dari Pengawas Perikanan Utama, Inspektorat Jenderal, Pusdatin, BPPSDMKP, Pusat Inovasi Administrasi Negara dan Profesional Bidang Inovasi.

Ditjen PSDKP berkomitmen akan terus berinovasi untuk menjadi yang terHEBAT.



Pemenang Lomba Inovasi



Inovasi Unit Pusat

No	Nama UPT	Nilai	Peringkat
1	Dit. Pengawasan PSDK	81,8	Terbaik ke-1
2	Dit. POA	81,4	Terbaik ke-2
3	Setditjen PSDKP	80,4	Terbaik ke-3

Inovasi Unit Pelaksana Teknis

No	Nama UPT	Nilai	Peringkat
1	PSDKP Batam	81,0	Terbaik ke-1
2	PSDKP Tual	79,8	Terbaik ke-2
3	PSDKP Bitung	78,8	Terbaik ke-3
4	PSDKP Kupang	78,4	Terbaik ke-4
5	PSDKP Jakarta	78,1	Terbaik ke-5

Sumbang Saran

No	Nama UPT	Nilai	Peringkat
1	Annis Susanti	80,1	Terbaik ke-1
2	M. Nur Nawawi	79,8	Terbaik ke-2
3	Ridwan Nurzaha	78,8	Terbaik ke-3

Menyebarkan Hati yang Berintegritas

Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah dimana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen **untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas publik.**

WBK adalah predikat bagi unit kerja yang dapat mengimplementasikan upaya perbaikan dan pencegahan dari tindak korupsi, sedangkan WBBM merupakan predikat bagi unit kerja pada tahapan selanjutnya setelah dapat mengimplementasikan dan memperoleh predikat WBK, sebagai apresiasi atas upaya perbaikan bebas korupsi dan pelayanan publik yang prima. berdampak.

Pada perjalanan pembangunan Zona Integritas Ditjen PSDKP, dari 15 (lima belas) UPP sebanyak 14 UPP lingkup Ditjen PSDKP telah memperoleh predikat WBK periode tahun 2018 s.d 2023. Perolehan predikat ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai integritas organisasi yang berdampak.

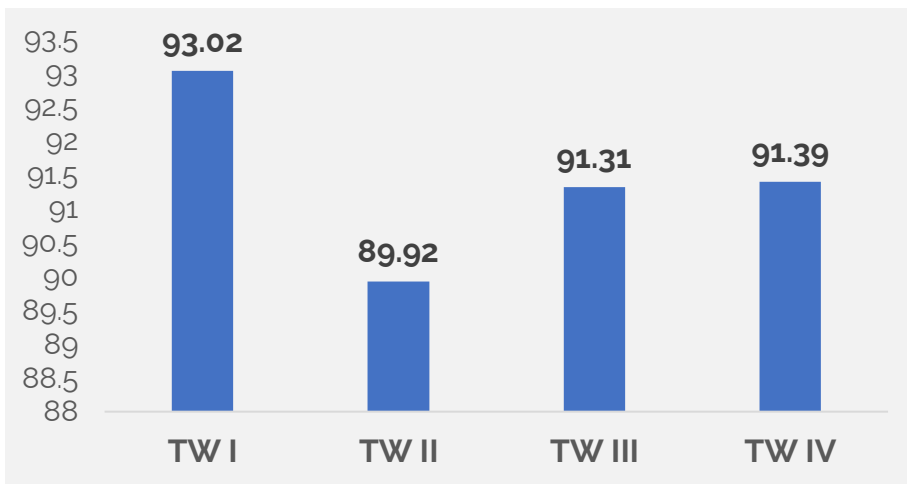


Pelayanan Publik, Sesuatu yang Dinanti & Di Maki

Kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dukungan partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang beretika.



Kehadiran pelayanan publik yang prima merupakan hal yang dinanti-nanti oleh pengguna layanan. Namun sebaliknya, jika pelayanan tersebut tidak memuaskan akan menjadi maki dari pengguna layanan. Pulas tidaknya masyarakat diukur dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.



**Hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat
Dirjen PSDKP**



Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

